



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 616/SETDA/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah, maka Perlu menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja masing-masing Perangkat Daerah agar :
- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
 - c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 19 Desember 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 616/SETDA/TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 Desember 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA			
MISI 1 :	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.	1.1. Meningkatnya angka melek huruf	• Pemberantasan buta huruf	- Meningkatkan angka melek huruf lebih dari 95% melalui pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1.2. Tercapainya rata-rata lama sekolah	• Peningkatan rata-rata lama sekolah	- Optimalisasi PKBM - Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan	
	1.3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Menurunkan angka putus sekolah
				- Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit menuju akreditasi utama
				- Meningkatkan usia harapan hidup mendekati 73 tahun
				- Menurunkan angka kematian bayi per 1000 KH di bawah rata-rata provinsi
				- Menurunkan angka kematian ibu melahirkan di bawah rata-rata provinsi
			- Menurunkan angka stunting	
			- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di atas 85%	
			- Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2 anak	
2. Meningkatkan kualitas kerukunan, dan kehidupan beragama masyarakat.	2.1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama	
	2.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru agama - Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	

LEMBAR KERJA 2

MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius.		
SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya angka melek huruf	1.1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	1.3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	1.4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
2 Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	2.2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	2.3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	2.4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
	2.5. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	3.2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	3.3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	3.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	3.5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	3.6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	3.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	3.8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	3.9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.10. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	3.11. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	3.12. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
4 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	4.1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
	4.2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESBANGPOL
	4.3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARPOL, PENDIDIKAN POLITIK, PENGEMBANGAN ETIKA & BUDAYA	
	4.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	4.5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	4.6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17 KECAMATAN
5 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	5.1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESBANGPOL
	5.2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
	5.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17 KECAMATAN

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius.
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
	2. Meningkatkan kualitas kerukunan, dan kehidupan beragama masyarakat.
SASARAN	1. Meningkatnya angka melek huruf
	2. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun
	3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat
	5. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya angka melek huruf
	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya angka melek huruf	UTAMA	BKY.01 - 01
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	UTAMA	BKY.01 - 02
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UTAMA	BKY.01 - 03
4	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	UTAMA	BKY.01 - 04
5	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	UTAMA	BKY.01 - 05
6	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.01 - 06
7	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.01 - 07
8	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.01 - 08
9	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.01 - 09

LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BKY.01 - 01.01	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BKY.01 - 01.01.01
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	BKY.01 - 01.01.02
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	BKY.01 - 01.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	BKY.01 - 01.02.01
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	BKY.01 - 01.03	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	BKY.01 - 01.03.01
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	BKY.01 - 01.04	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	BKY.01 - 01.04.01
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BKY.01 - 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BKY.01 - 02.01.01
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	BKY.01 - 02.01.02
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	BKY.01 - 02.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	BKY.01 - 02.02.01
7	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	BKY.01 - 02.03	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	BKY.01 - 02.03.01
8	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	BKY.01 - 02.04	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	BKY.01 - 02.04.01
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	BKY.01 - 02.05	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 02.05.01
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKY.01 - 03.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.01.01
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.01.02
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	BKY.01 - 03.01.03
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.01.04

11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	BKY.01 - 03.02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.02.01
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.02.02
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.02.03
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	BKY.01 - 03.03	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	BKY.01 - 03.03.01
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	BKY.01 - 03.03.02
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	BKY.01 - 03.03.03
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	BKY.01 - 03.03.04
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	BKY.01 - 03.03.05
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	BKY.01 - 03.03.06
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BKY.01 - 03.04	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.04.01
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.04.02
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.04.03

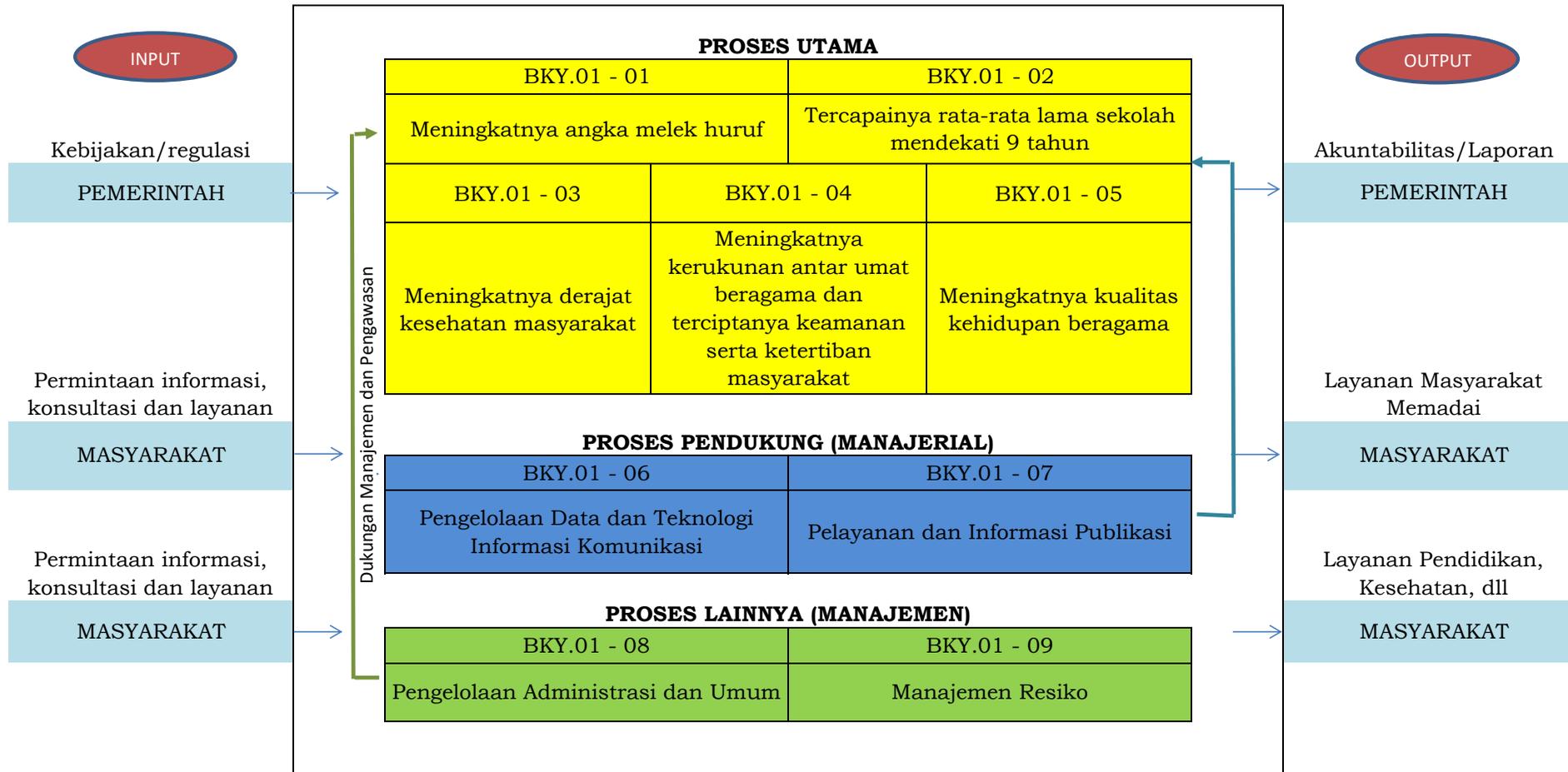
14	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BKY.01 - 03.05	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.05.01
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.05.02
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.05.03
15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	BKY.01 - 03.06	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.06.01
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.06.02
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.06.03
16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	BKY.01 - 03.07	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	BKY.01 - 03.07.01
17	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	BKY.01 - 03.08	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	BKY.01 - 03.08.01
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	BKY.01 - 03.08.02
18	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	BKY.01 - 03.09	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.09.01
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.09.02
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.09.03

19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	BKY.01 - 03.10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.10.01
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.10.02
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	BKY.01 - 03.11	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.11.01
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 03.11.02
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	BKY.01 - 03.11.03
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	BKY.01 - 03.11.04
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	BKY.01 - 03.11.05
21	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	BKY.01 - 03.12	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	BKY.01 - 03.12.01
22	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	BKY.01 - 04.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.01 - 04.01.01
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	BKY.01 - 04.01.02
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	BKY.01 - 04.01.03
23	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BKY.01 - 04.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BKY.01 - 04.02.01

24	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARPOL, PENDIDIKAN POLITIK, PENGEMBANGAN ETIKA & BUDAYA POLITIK	BKY.01 - 04.03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	BKY.01 - 04.03.01
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BKY.01 - 04.04	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BKY.01 - 04.04.01
26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BKY.01 - 04.05	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BKY.01 - 04.05.01
27	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	BKY.01 - 04.06	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	BKY.01 - 04.06.01
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	BKY.01 - 04.06.02
28	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BKY.01 - 05.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BKY.01 - 05.01.01
29	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BKY.01 - 05.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	BKY.01 - 05.02.01
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	BKY.01 - 05.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	BKY.01 - 05.03.01

LEMBAR KERJA 7

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 1



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 1

- 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah
Sekretariat Daerah
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pihak ke 3
- 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PAUD/NON FORMAL
SD
SMP
- 3 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretariat Daerah
- 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah
- 2 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kecamatan
Masyarakat
- 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sekretariat Daerah
Puskesmas
Masyarakat
- 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah
- 8 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BPOM
Sekretariat Daerah
Masyarakat
- 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kecamatan
Masyarakat
- 10 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Masyarakat
- 11 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Polres
Masyarakat
- 12 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
BPS
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kecamatan
- 13 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sekretariat Daerah
Kecamatan
Masyarakat

14 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Kepolisian
Masyarakat

15 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kecamatan
Masyarakat

16 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kecamatan
Sekolah
Masyarakat

17 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kecamatan
Sekolah
Masyarakat

2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja
Semua Perangkat Daerah
Masyarakat

19 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Semua Perangkat Daerah
Organisasi Kemasyarakatan
Masyarakat

20 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARPOL, PENDIDIKAN POLITIK, PENGEMBANGAN ETIKA & BUDAYA POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Semua Perangkat Daerah
Organisasi Kemasyarakatan
Komisi Pemulihan Umum
Masyarakat

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Organisasi kemasyarakatan
Pemuka Agama
Sekretariat Daerah

22 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Daerah
Badan Narkotika Nasional
Masyarakat

23 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kecamatan
Kepolisian
TNI
Tokoh Masyarakat
Tokoh Agama
Masyarakat

24 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Daerah
TNI/POLRI
Masyarakat

LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES

INPUT

Perumusan Kebijakan/regulasi

BKY.01 - 01

Meningkatnya angka melek huruf

BKY.01 - 01.01

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

OUTPUT

Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas dan tepat fungsi

BKY.01 - 02

Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun

BKY.01 - 02.01

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas dan tepat fungsi

BKY.01 - 03

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

BKY.01 - 03.01

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Sarana Prasarana kesehatan terpenuhi dan layanan kesehatan memadai

BKY.01 - 04

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat

BKY.01 - 04.01

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Masyarakat Tertib

BKY.01 - 05

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

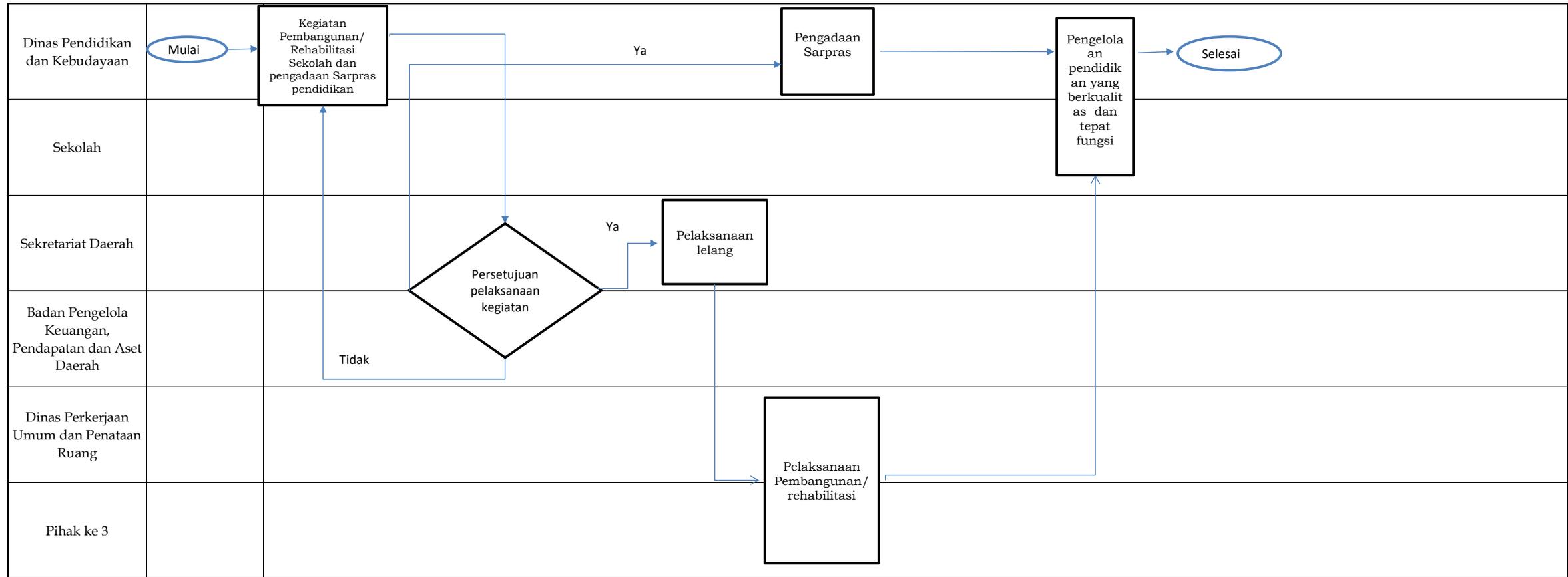
BKY.01 - 05.01

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan dini dan konflik sosial

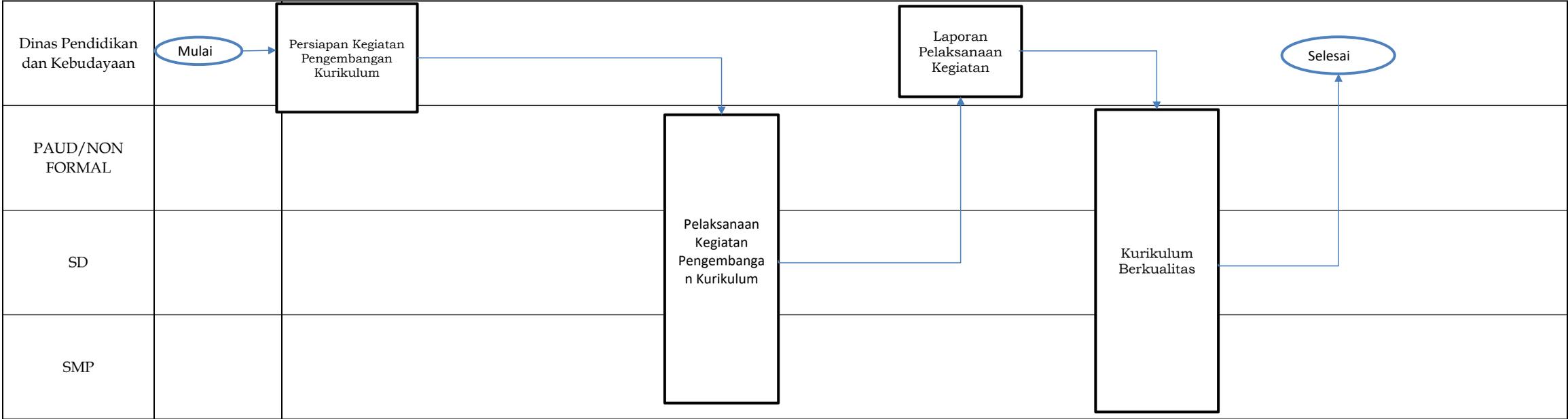
PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 01

BKY.01 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN



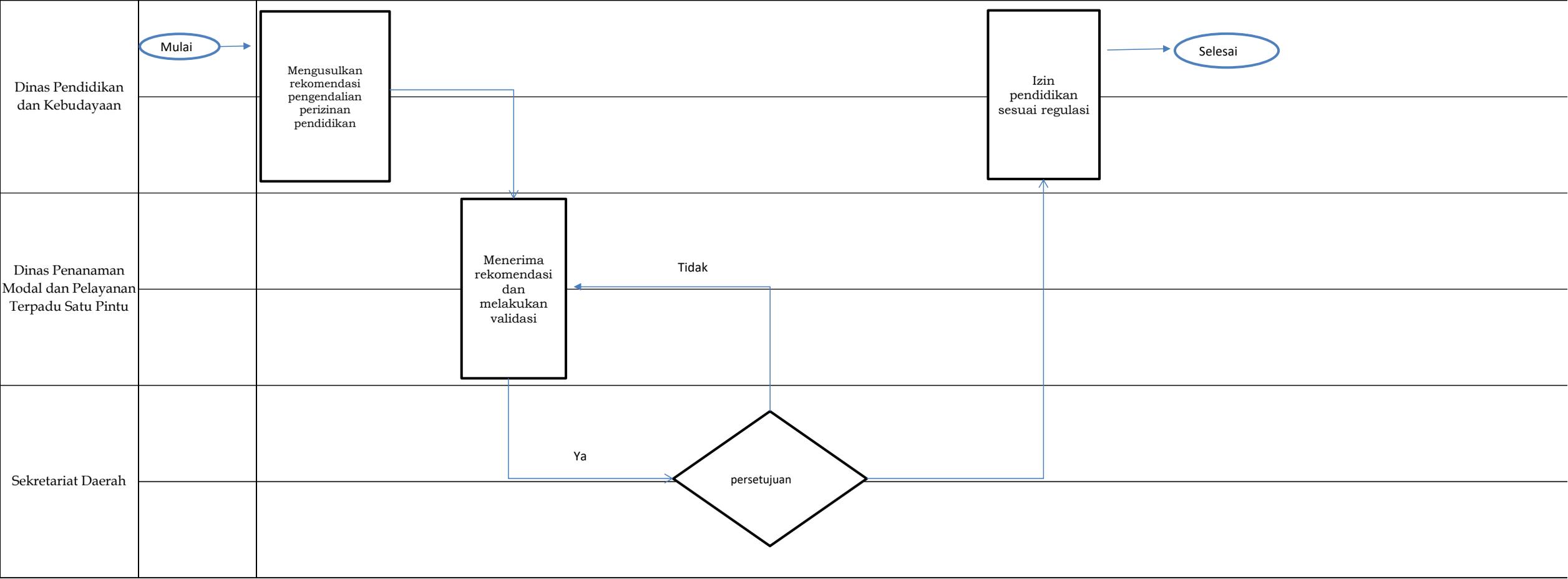
PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 01

BKY.01 - 01.02 CFM 01 : PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM



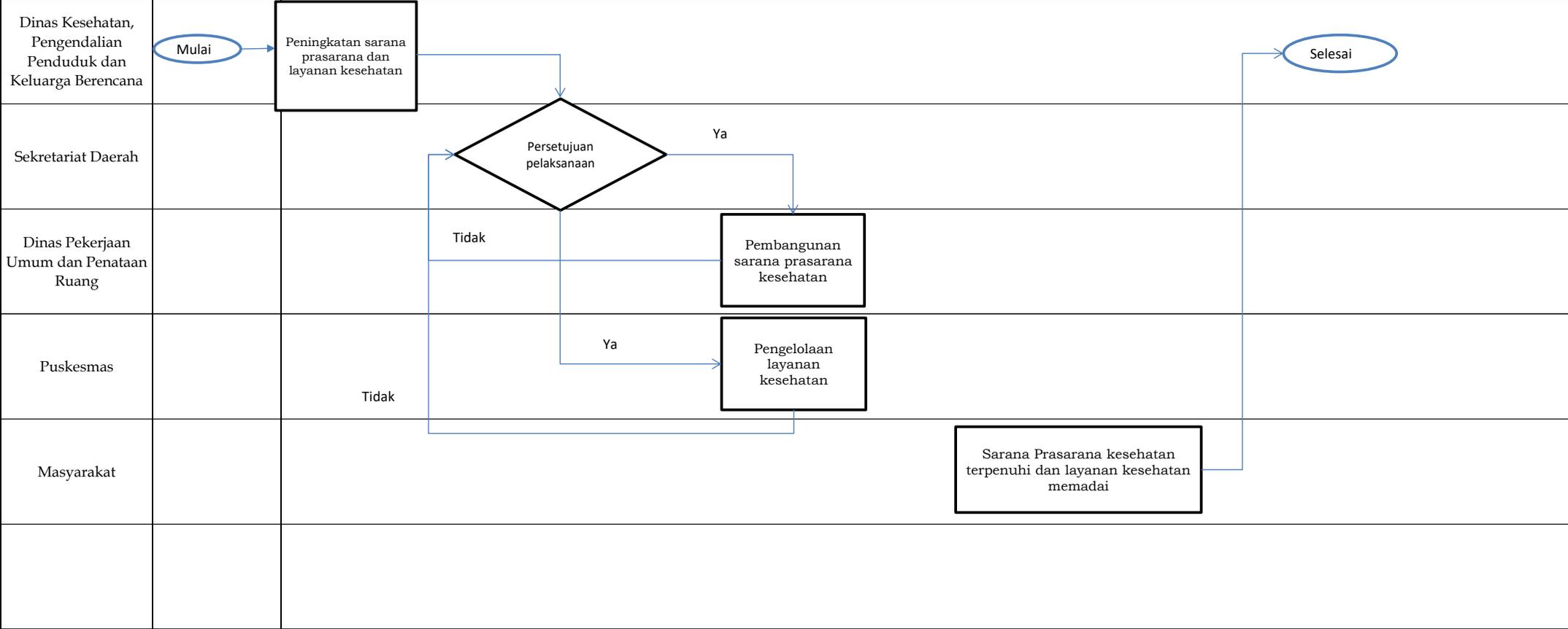
PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 01

BKY.01 - 01.03 CFM 01 : PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN



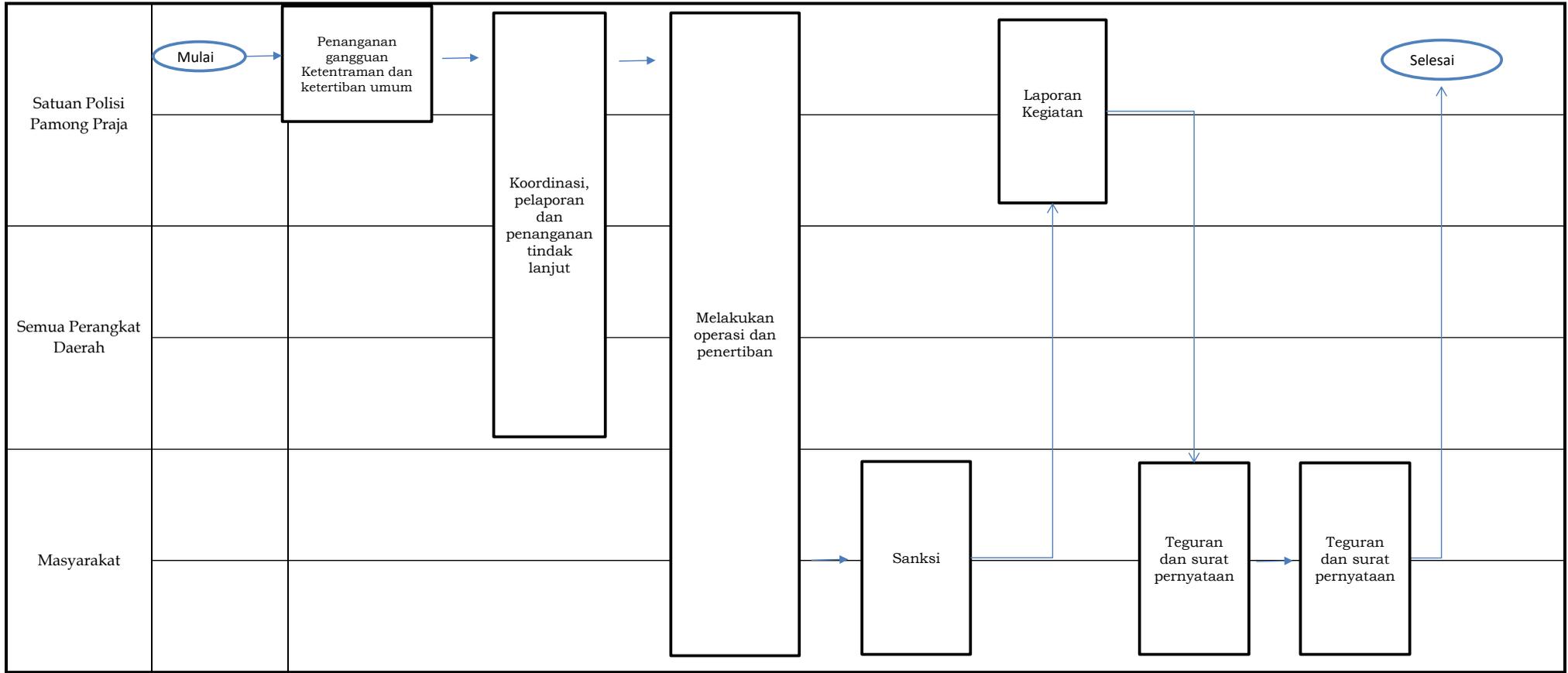
PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 01

BKY.01 - 03.01 CFM 01 : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



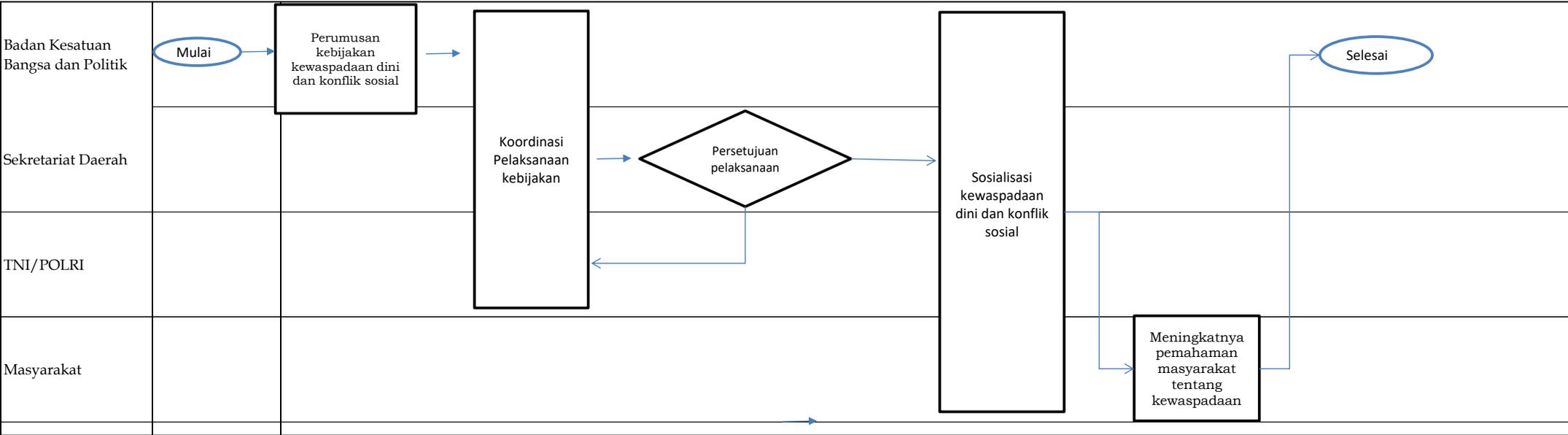
PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 04

BKY.01 - 04.01 CFM 01 : PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



PETA LINTAS FUNGSI BKY.01 - 04

BKY.01 - 05.01 CFM 01 : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA		
MISI 2 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	1.1. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin aparatur sipil negara 	- Optimalisasi ananlisa kebutuhan diklat
			- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara 	- Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
			- Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara
			- Meningkatkan pengembangan karir ASN
			- Optimalisasi pengisian formasi jabatan ASN
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian 	- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara elektronik
			- Meningkatkan pengelolaan mutasi data kepegawaian
			- Meningkatkan pembinaan jabatan fungsional
			- Meningkatkan pembinaan ASN
	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi 	- Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan ASN	
		- Optimalisasi penatausahaan kepegawaian	
		- Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik	
		- Meningkatkan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	
1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Daerah 	- Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah	
		- Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah	
		- Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN	
		- Melaksanakan lelang jabatan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemandirian fiskal daerah 	- Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran, Mengoptimalkan pengendalian anggaran	
		- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		- Meningkatkan kualitas komunikasi dengan DPRD	
		- Meningkatkan penerimaan pajak BPHTB melalui rasionalisasi NJOP yang mendekati harga pasar	
		- Evaluasi tarif pajak daerah	
		- Sosialisasi pemanfaatan hasil pajak daerah sekaligus sosialisasi kebijakan pemungutan pajak	

	1.3. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan dan pengawasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
			<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penghargaan bagi OPD yang nihil temuan
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Nilai SAKIP
			<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki predikat SPBE
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi
	1.4. Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik
<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Pemda berbasis elektronik 			
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Forum CSR perusahaan dan peningkatan jumlah dana CSR perusahaan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kinerja BUMD dan pembentukan BUMD baru 	

LEMBAR KERJA 2

MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan kapasitas SDM aparatur	1.1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
	1.2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD
	2.2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	2.3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
3 Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	SEMUA OPD
	3.2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	SEKRETARIAT DPRD
	3.3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	SEKRETARIAT DPRD
	3.4. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	INSPEKTORAT
	3.5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
	3.6. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SEKRETARIAT DAERAH
	3.7. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAPPEDA
	3.8. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17 KECAMATAN
	3.9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	3.10. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	3.11. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	3.12. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	3.13. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	3.14. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	3.15. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
	3.16. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	3.17. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.18. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	3.19. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
	3.20. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN	
4 Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	4.1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
TUJUAN	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah
SASARAN	1. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	3. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	4. Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	UTAMA	BKY.02 - 01
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	UTAMA	BKY.02 - 02
3	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	UTAMA	BKY.02 - 03
4	Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	UTAMA	BKY.02 - 04
5	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.02 - 05
6	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.02 - 06
7	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.02 - 07
8	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.02 - 08

LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKY.02 - 01.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKY.02 - 01.01.01
			Mutasi dan Promosi ASN	BKY.02 - 01.01.02
			Pengembangan Kompetensi ASN	BKY.02 - 01.01.03
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKY.02 - 01.01.04
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKY.02 - 01.02	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKY.02 - 01.02.01
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKY.02 - 01.02.02
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKY.02 - 02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKY.02 - 02.01.01
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKY.02 - 02.01.02
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKY.02 - 02.01.03
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKY.02 - 02.01.04
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKY.02 - 02.01.05
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKY.02 - 02.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKY.02 - 02.02.01
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BKY.02 - 02.03	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKY.02 - 02.03.01
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	BKY.02 - 03.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.01.01
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.01.02
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.01.03
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.01.04
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.01.05
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKY.02 - 03.01.06
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKY.02 - 03.01.07
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKY.02 - 03.01.08

7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BKY.02 - 03.02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BKY.02 - 03.02.01
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BKY.02 - 03.02.02
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BKY.02 - 03.02.03
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	BKY.02 - 03.02.04
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BKY.02 - 03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BKY.02 - 03.03.01
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BKY.02 - 03.03.01
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BKY.02 - 03.03.01
9	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BKY.02 - 03.04	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	BKY.02 - 03.04.01
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	BKY.02 - 03.04.02
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	BKY.02 - 03.04.03
			Peningkatan Kapasitas DPRD	BKY.02 - 03.04.04
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	BKY.02 - 03.04.05
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	BKY.02 - 03.04.06
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	BKY.02 - 03.04.07
			Fasilitasi Tugas DPRD	BKY.02 - 03.04.08
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	BKY.02 - 03.05	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	BKY.02 - 03.05.01
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	BKY.02 - 03.05.02
11	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	BKY.02 - 03.06	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	BKY.02 - 03.06.01
			Pendampingan dan Asistensi	BKY.02 - 03.06.02
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BKY.02 - 03.07	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	BKY.02 - 03.07.01
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	BKY.02 - 03.07.02
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	BKY.02 - 03.07.03
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	BKY.02 - 03.07.04

13	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BKY.02 - 03.08	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BKY.02 - 03.08.01
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	BKY.02 - 03.08.02
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	BKY.02 - 03.08.03
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BKY.02 - 03.08.04
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKY.02 - 03.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	BKY.02 - 03.09.01
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	BKY.02 - 03.09.02
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	BKY.02 - 03.09.03
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	BKY.02 - 03.09.04
15	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	BKY.02 - 03.10	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	BKY.02 - 03.10.01
			Penataan Pendaftaran Penduduk	BKY.02 - 03.10.02
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	BKY.02 - 03.10.03
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	BKY.02 - 03.10.04
16	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	BKY.02 - 03.11	Pelayanan Pencatatan Sipil	BKY.02 - 03.11.01
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	BKY.02 - 03.11.02
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	BKY.02 - 03.11.03
17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	BKY.02 - 03.12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	BKY.02 - 03.12.01
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BKY.02 - 03.12.02
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BKY.02 - 03.12.03
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BKY.02 - 03.12.04
18	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	BKY.02 - 03.13	Penyusunan Profil Kependudukan	BKY.02 - 03.13.01
19	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BKY.02 - 03.14	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.14.01
20	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	BKY.02 - 03.15	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.15.01

			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.15.02
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	BKY.02 - 03.16	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.16.01
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BKY.02 - 03.17	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.17.01
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	BKY.02 - 03.17.02
23	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	BKY.02 - 03.18	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.18.01
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.18.02
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.18.03
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	BKY.02 - 03.19	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	BKY.02 - 03.19.01
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.19.02
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	BKY.02 - 03.19.03
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.19.04
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	BKY.02 - 03.19.05
25	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	BKY.02 - 03.20	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.20
26	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	BKY.02 - 04.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.02 - 03.20

LEMBAR KERJA 7

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 2



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 2

1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Semua Perangkat Daerah

2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
BPSDM Provinsi
Semua Perangkat Daerah

3 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Inspektorat
Semua Perangkat daerah
Sekretariat Daerah

**4 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Perangkat Daerah
Badan pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Semua Perangkat Daerah
Inspektorat
Sekretariat Daerah

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Inspektorat
Semua Perangkat Daerah

6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

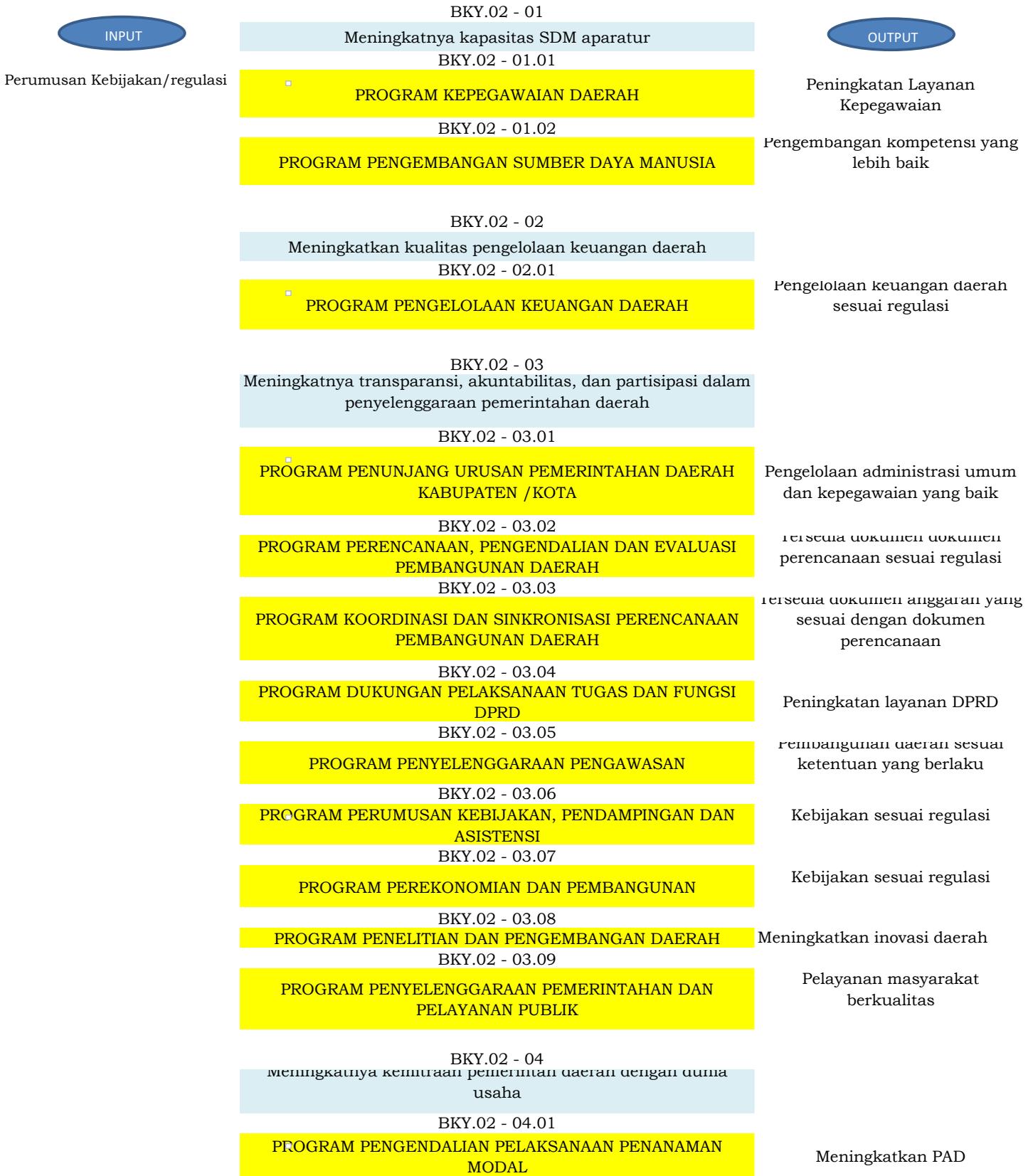
Sekretariat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Semua Perangkat Daerah

**7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK**

Kecamatan
Desa
Masyarakat
Sekretariat Daerah

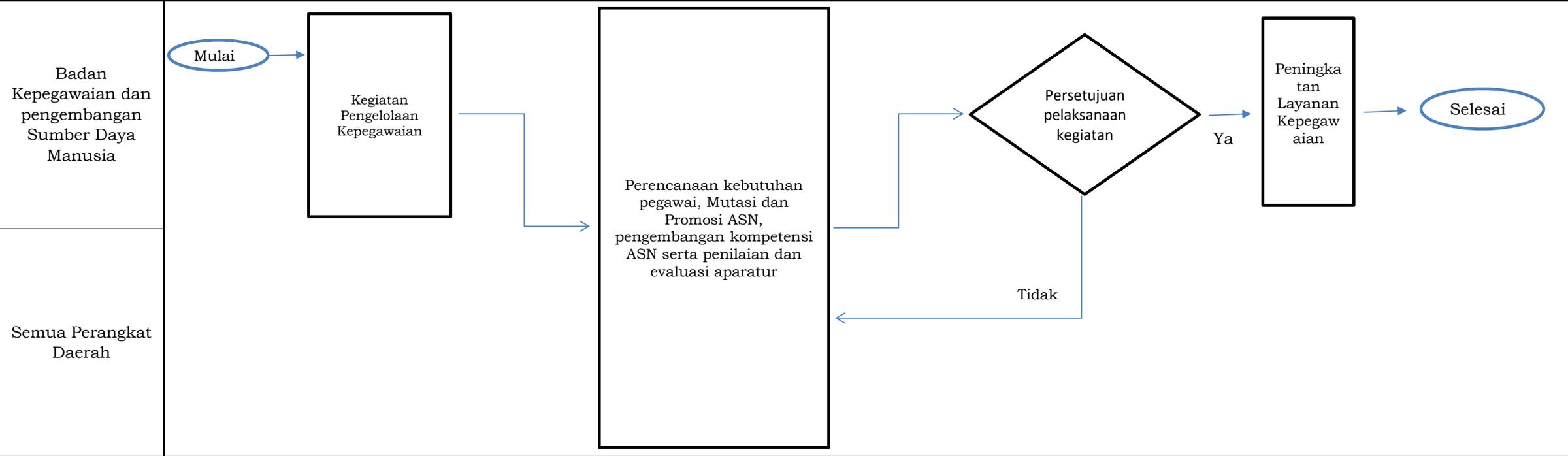
LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES



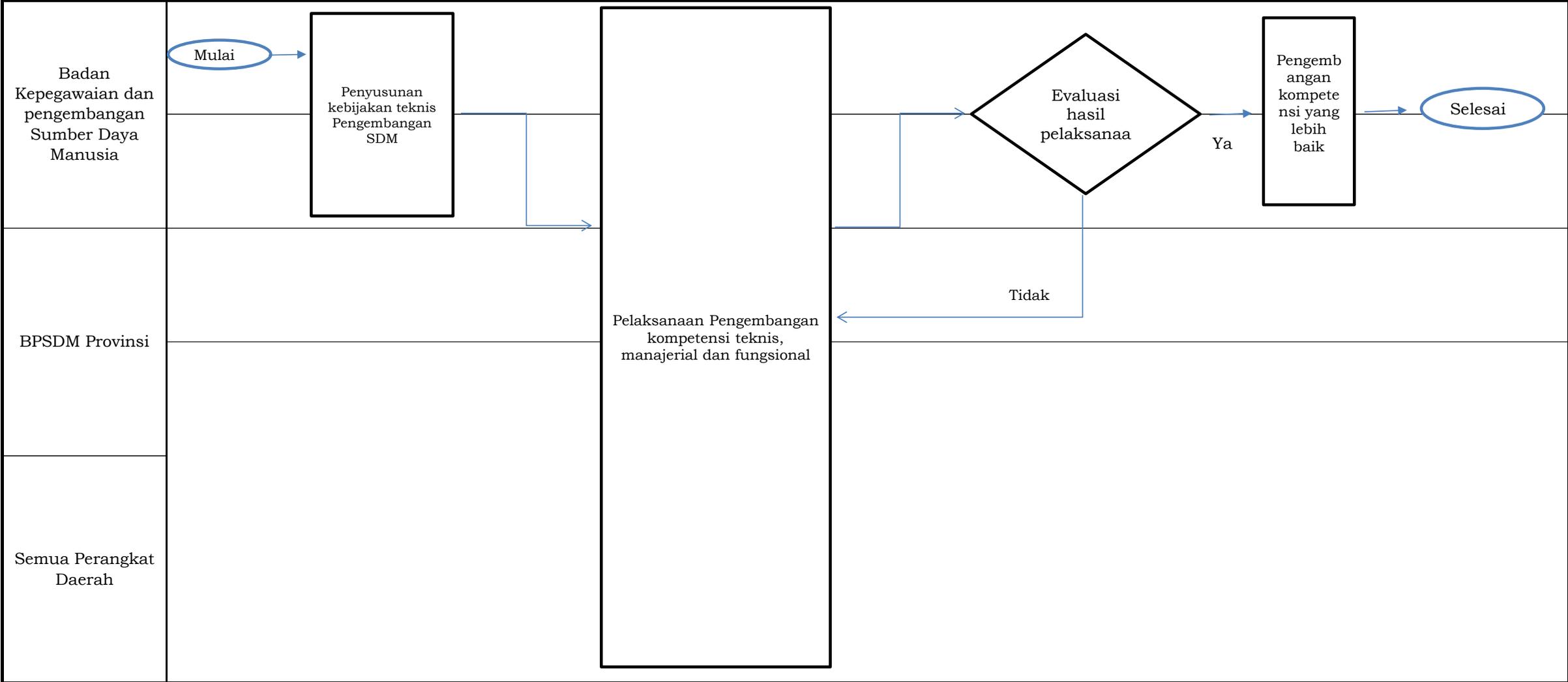
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



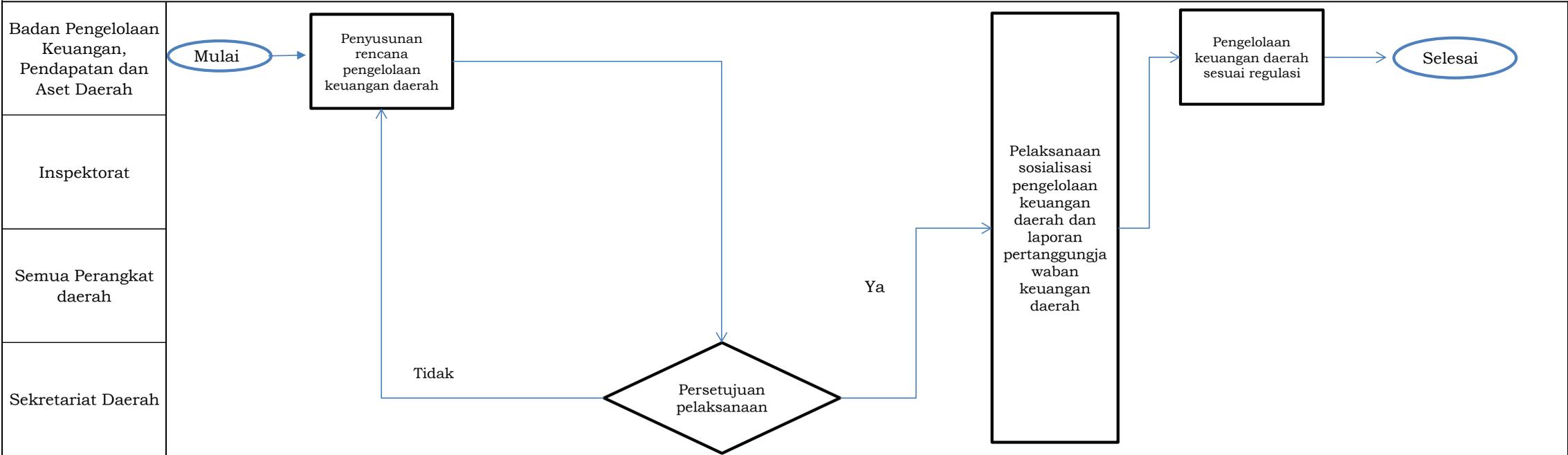
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 01.02 CFM 01 : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



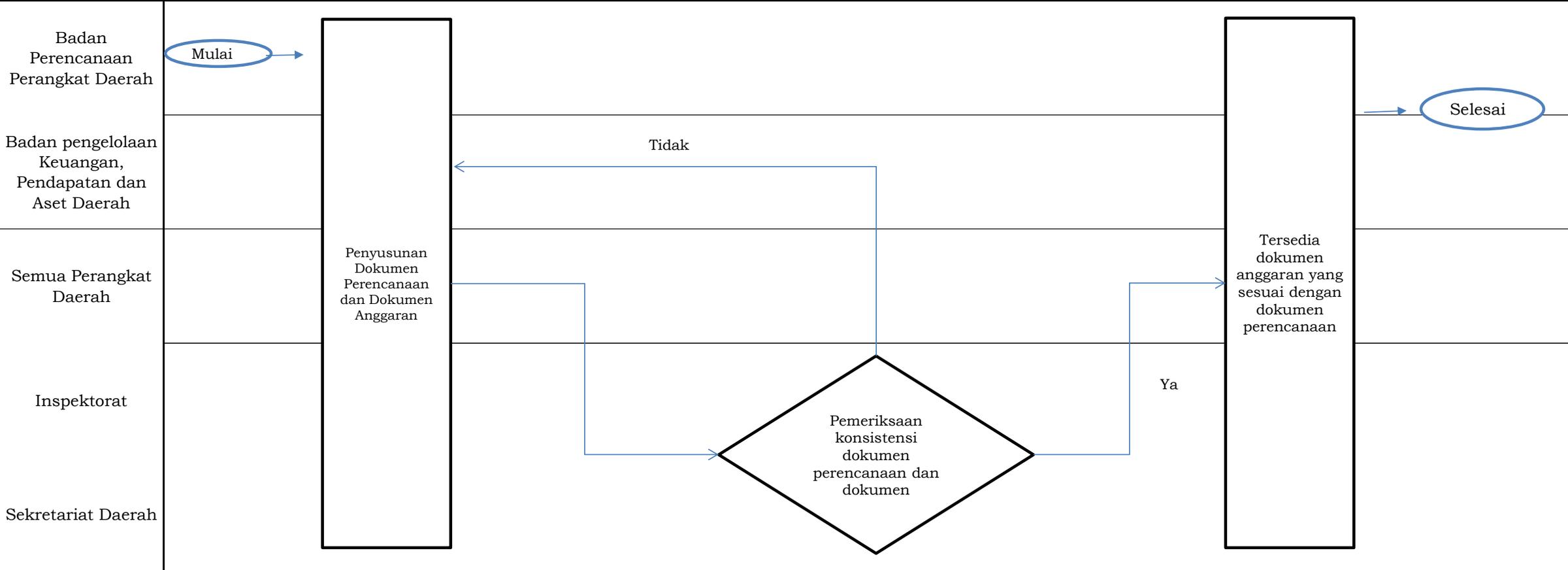
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 02.01 CFM 01 : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



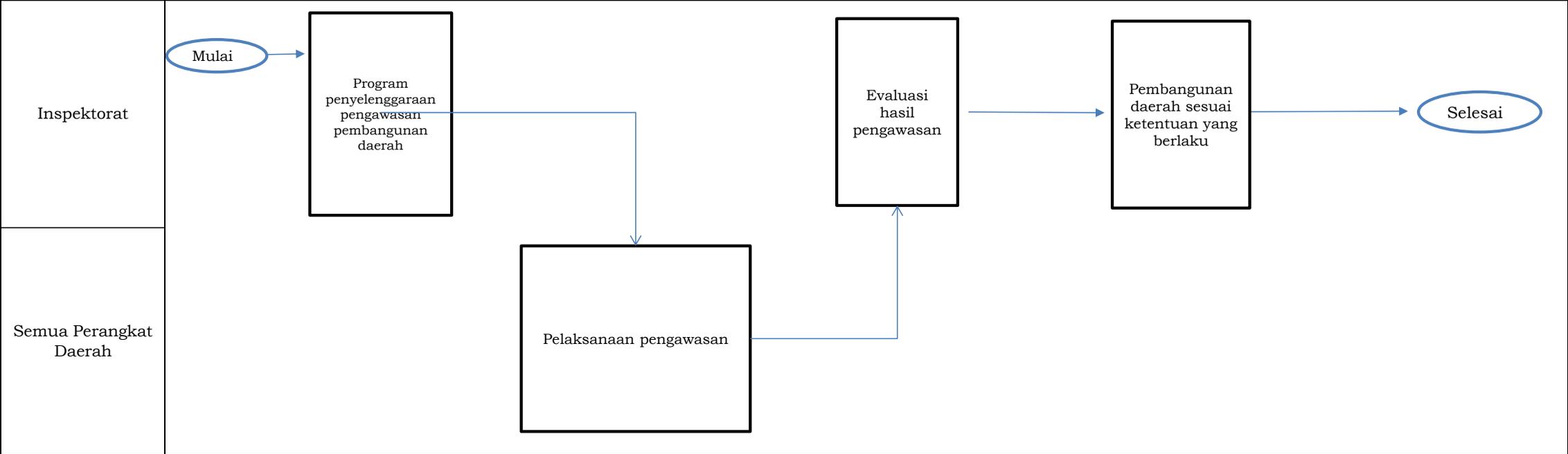
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 03.03 CFM 01 : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



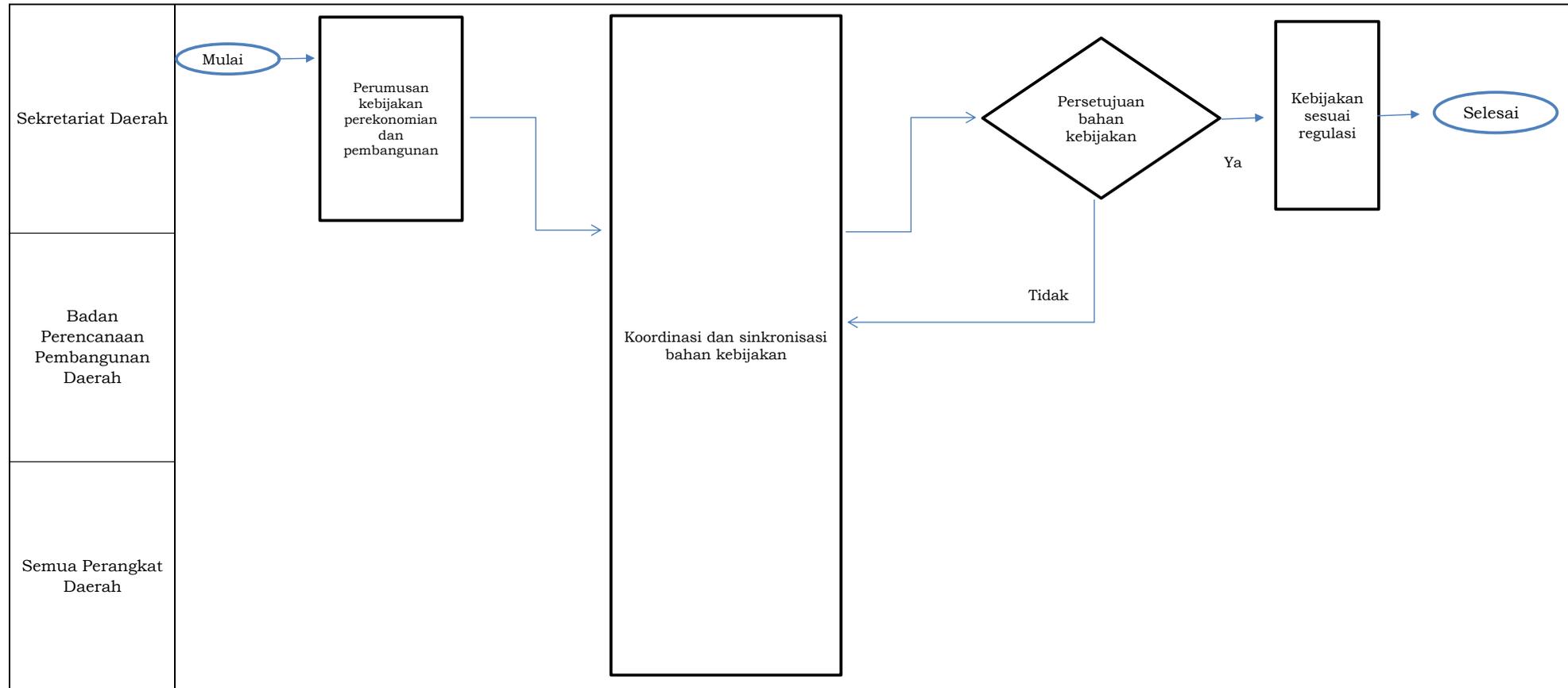
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 03.05 CFM 01 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN



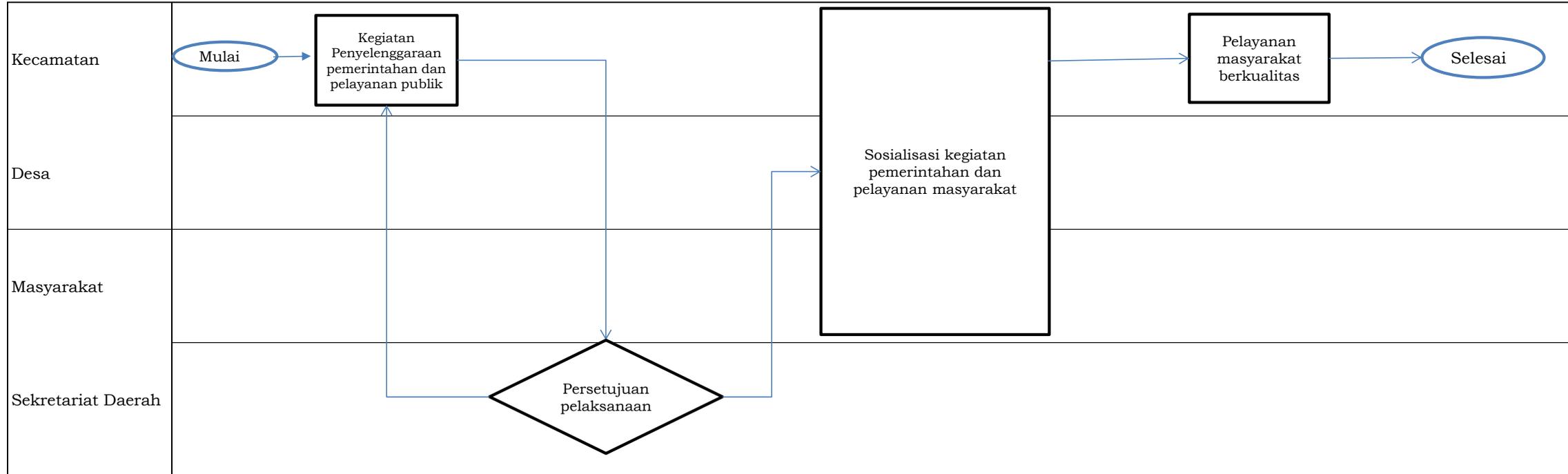
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 03.07 CFM 01 : PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



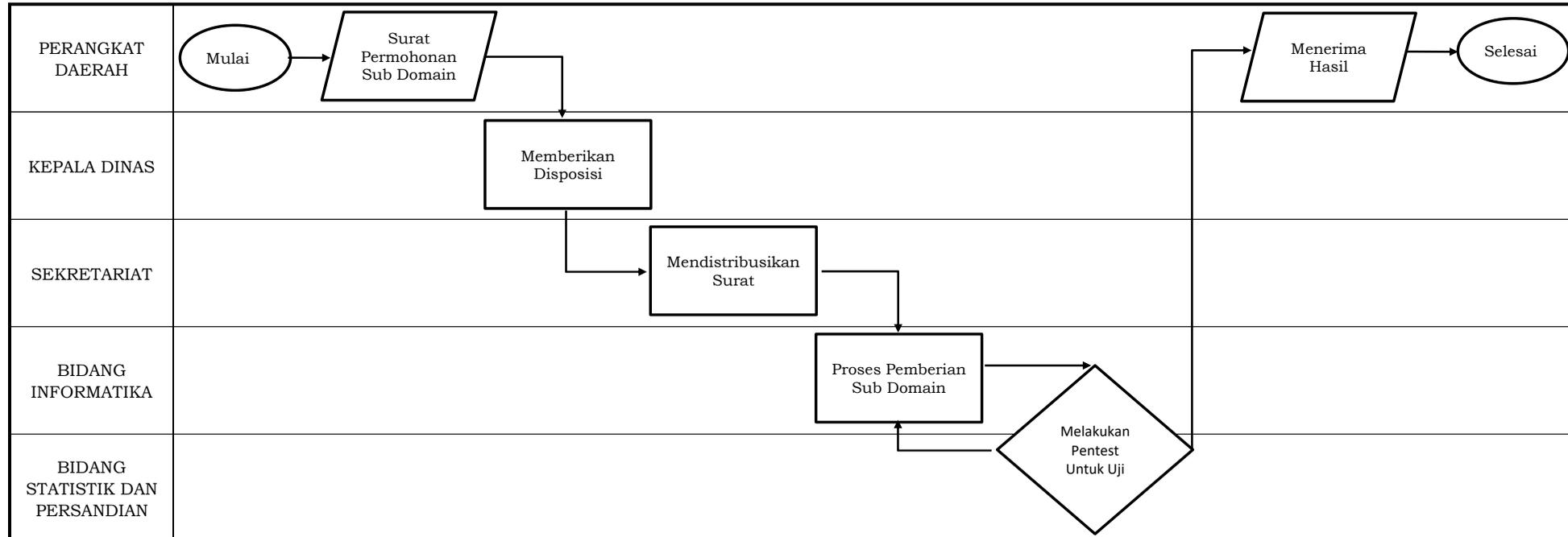
PETA LINTAS FUNGSI BKY.02 - 01

BKY.02 - 03.09 CFM 01 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



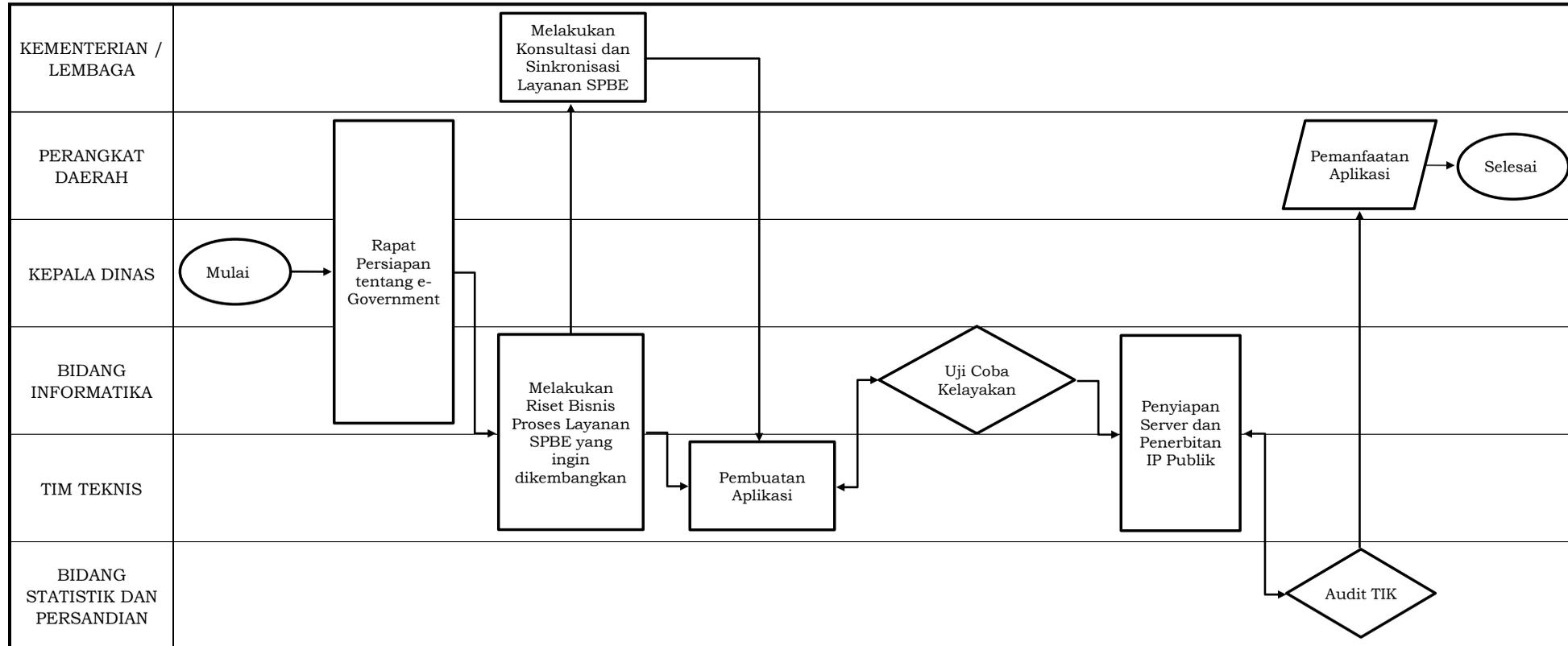
PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 1.01.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota



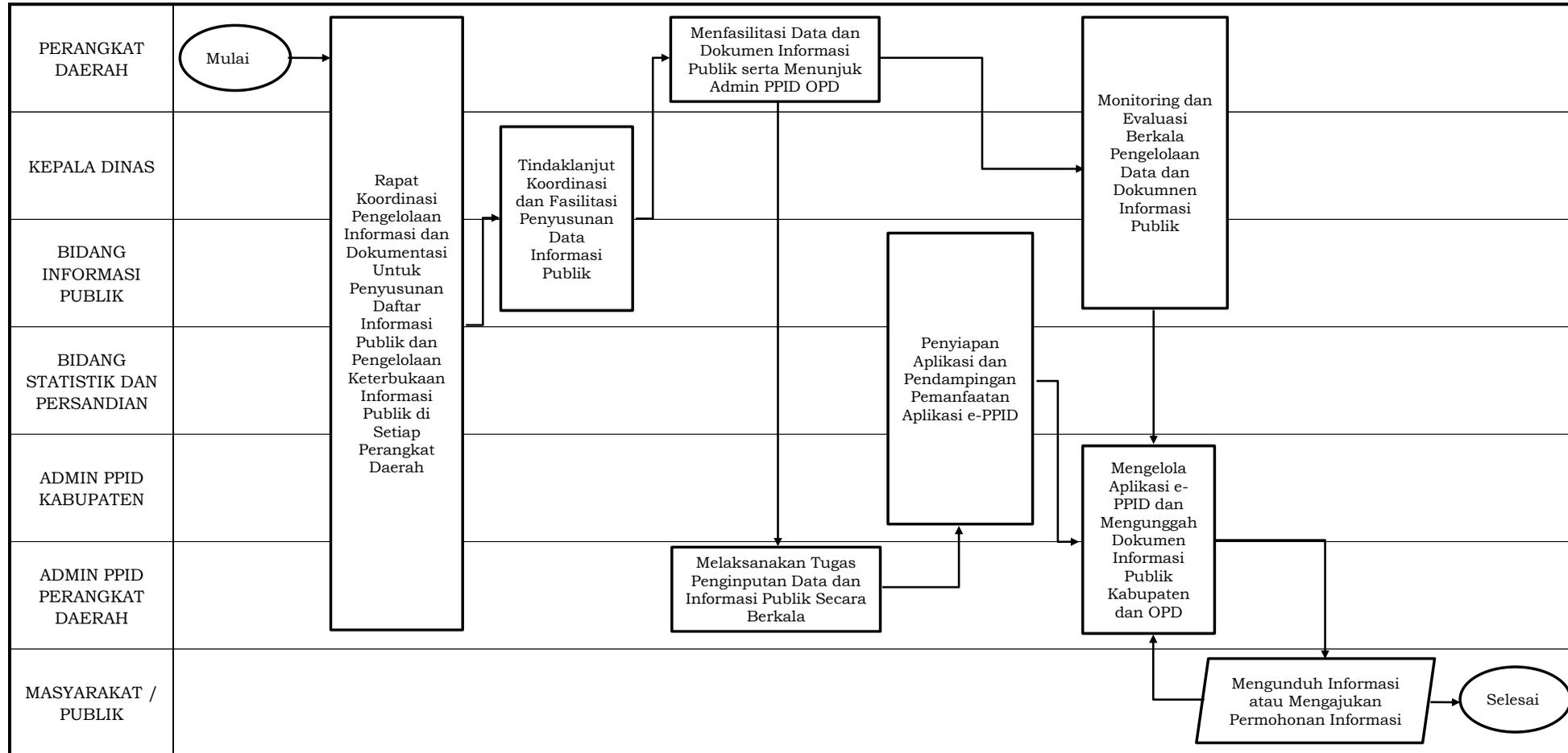
PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 1.01.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota



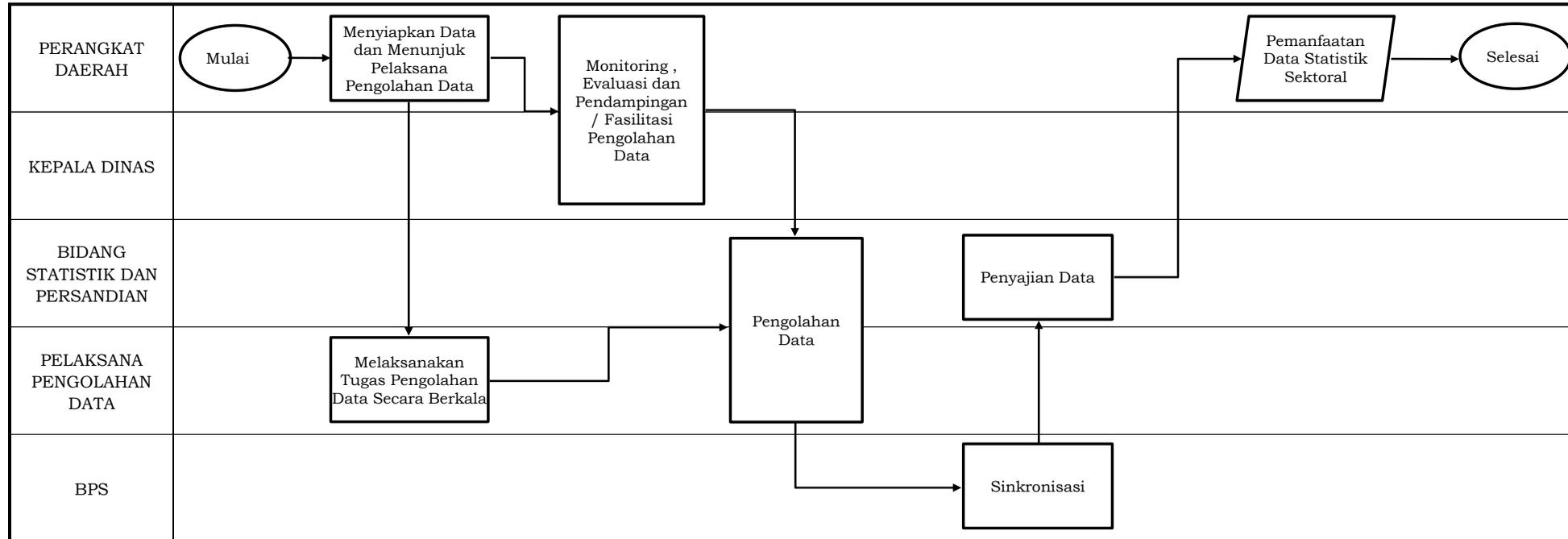
PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 2.01.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota



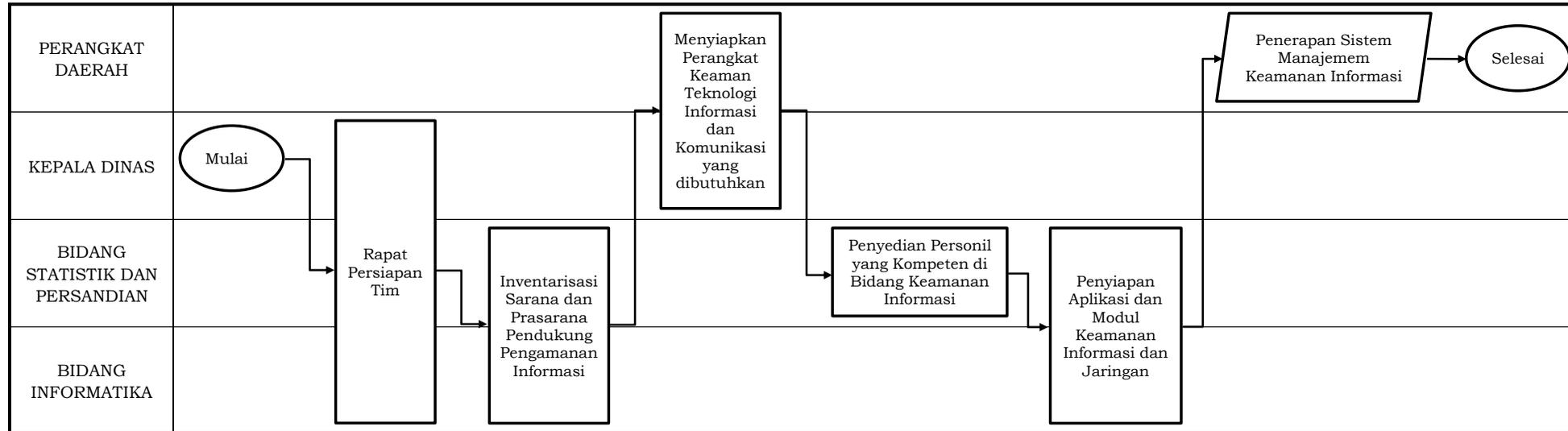
PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 2.02.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota



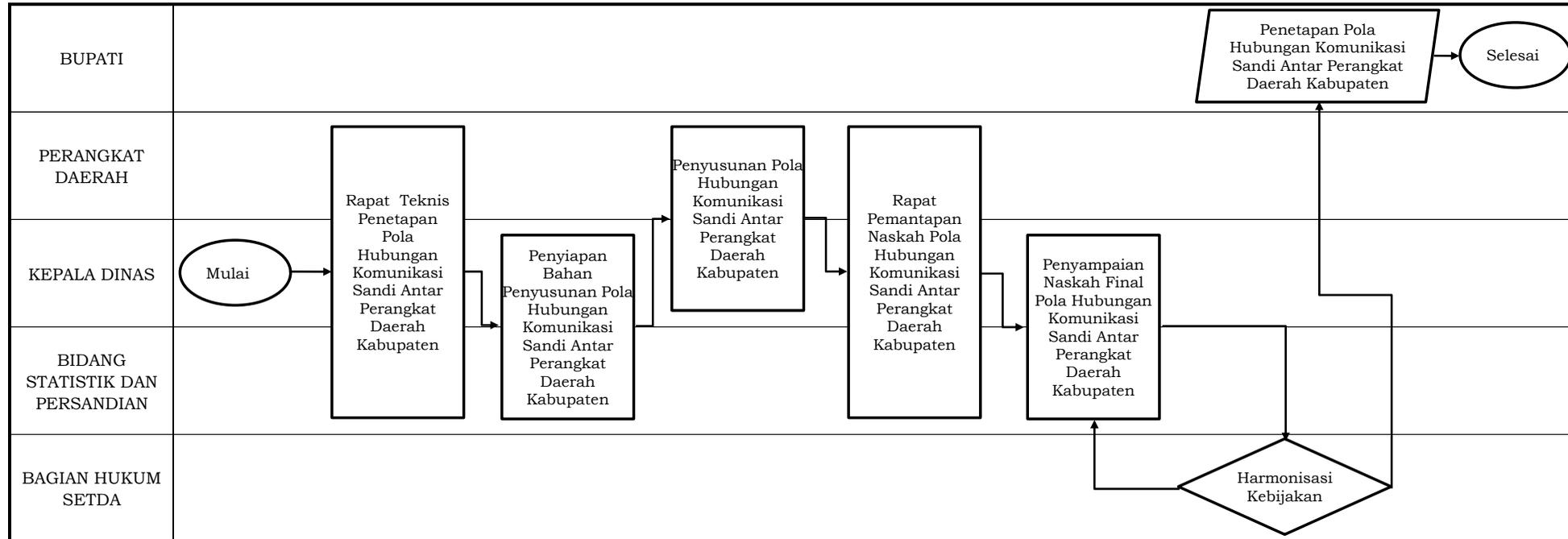
PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 2.03.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota



PETA LINTAS FUNGSI

KOMINFO 2.03.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA		
MISI 3 :	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar permukiman	1.1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	• Peningkatan persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	- Pemantapan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan - Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan - Penambahan panjang jalan (jalan baru)
		• Peningkatan konektivitas desa ke kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan ke ibukota kabupaten	- Peningkatan akses jalan desa ke jalan kabupaten - Peningkatan akses jalan kabupaten ke jalan provinsi dan jalan nasional
		• Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	- Peningkatan pengawasan jalur sungai - Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat - Peningkatan pengawasan jalur darat - Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan - Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
		• Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	- Pengembangan alat pengujian kelayakan kendaraan - Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang - Peningkatan layanan transportasi umum
	1.2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	• Peningkatan kapasitas dan kualitas air irigasi	- Rehabilitasi kondisi air irigasi existing - Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah
		• Peningkatan ketersediaan air bersih	- Inventarisasi dan pemanfaatan sumber air baku

	1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)	• Optimalisasi pengelolaan sanitasi	- Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah - Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL	
		• Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	- Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan - Pengembangan sistem drainase lingkungan perumahan	
		• Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan	- Peningkatan kapasitas sistem pengolahan persampahan	
			- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	
			- Penyediaan TPA berbasis Control Landfill serta penambahan area	
			- Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah	
		• Peningkatan ketersediaan rumah layak huni	- Pendataan kondisi perumahan dan permukiman	
			- Peningkatan ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan	
			- Optimalisasi pengembangan kawasan permukiman terpadu	
			- Renovasi rumah rusak/tidak layak huni	
		• Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	- Pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh	
			- Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan	
			- Peningkatan mesin pelayanan air minum	
		• Peningkatan akses masyarakat untuk telekomunikasi (internet)	- Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum	
- Penyediaan internet hingga ke desa - Penyediaan akses internet gratis di kantor desa dan fasilitas publik lainnya				
1.4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	• Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB)	- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konversi energi		
		- Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT		
	• Penyediaan tenaga listrik Non PLN	- Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN		
	• Pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya	- Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan.	2.1. Meningkatkan investasi daerah	• Peningkatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah	- Meningkatkan investasi - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi - Mengendalikan inflasi	
		2.2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan	• Peningkatan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)	- Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)
			2.3. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	• Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan

LEMBAR KERJA 2

MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.		
SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi	1.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.2. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	1.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
	1.4. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)	3.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	3.2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
	3.3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	3.4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	3.6. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	3.7. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	3.8. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4. Meningkatkan investasi daerah	4.1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPSTP
	4.2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	4.3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	4.4. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
5. Meningkatnya ekonomi kerakyatan	5.1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	5.2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
	5.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
	5.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	5.5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
6. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan	6.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	6.2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	
	6.3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	6.4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	6.5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	6.6. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	6.7. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	6.8. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	6.9. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	6.10. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	6.11. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	6.12. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar permukiman
	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
SASARAN	1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang
	2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya
	3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)
	4. Meningkatkan investasi daerah
	5. Meningkatnya ekonomi kerakyatan
	6. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang
	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya
	limbah)
	Meningkatkan investasi daerah
	Meningkatnya ekonomi kerakyatan
	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	UTAMA	BKY.03 - 01
2	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	UTAMA	BKY.03 - 02
3	limbah)	UTAMA	BKY.03 - 03
4	Meningkatkan investasi daerah	UTAMA	BKY.03 - 04
5	Meningkatnya ekonomi kerakyatan	UTAMA	BKY.03 - 05
6	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	UTAMA	BKY.03 - 06
7	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.03 - 07
8	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.03 - 08
9	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.03 - 09
10	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.03 - 10

LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BKY.03 - 01.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.01.01
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	BKY.03 - 01.02	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	BKY.03 - 01.02.01
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.02.02
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	BKY.03 - 01.02.03
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	BKY.03 - 01.02.04
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	BKY.03 - 01.03	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.01
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.02
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	BKY.03 - 01.03.03
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	BKY.03 - 01.03.04
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BKY.03 - 01.03.05
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.06
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.07
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	BKY.03 - 01.03.08
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	BKY.03 - 01.03.09
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah	BKY.03 - 01.03.10
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	BKY.03 - 01.03.11
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	BKY.03 - 01.03.12

			Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.13
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.14
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.15
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.03.16
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	BKY.03 - 01.04	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.04.01
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 01.04.02
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	BKY.03 - 01.04.03
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah	BKY.03 - 01.04.04
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	BKY.03 - 01.04.05
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	BKY.03 - 02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 02.01.01
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 02.01.02
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	BKY.03 - 02.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 02.02.01

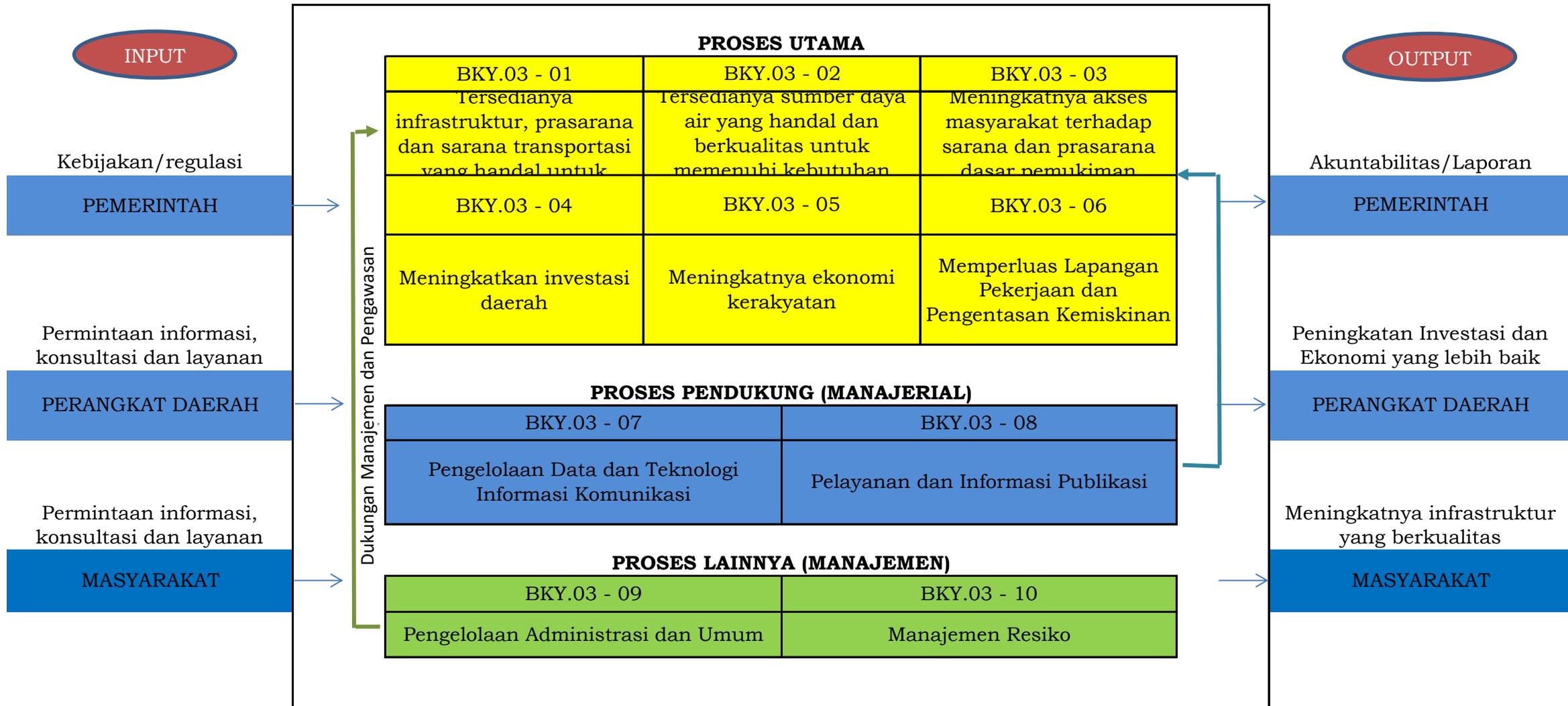
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	BKY.03 - 03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.01.01
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	BKY.03 - 03.02	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.02.01
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	BKY.03 - 03.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	BKY.03 - 03.03.01
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BKY.03 - 03.04	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.04.01
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.04.02
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.04.03
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.04.04
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	BKY.03 - 03.04.05
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	BKY.03 - 03.04.06
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BKY.03 - 03.05	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BKY.03 - 03.05.01
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	BKY.03 - 03.05.02
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	BKY.03 - 03.05.03
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BKY.03 - 03.06	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.06.01
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	BKY.03 - 03.07	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	BKY.03 - 03.0701
14	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	BKY.03 - 03.08	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	BKY.03 - 03.08.01
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	BKY.03 - 04.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 04.01.01

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	BKY.03 - 04.01.02
16	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	BKY.03 - 04.02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 04.02.01
17	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BKY.03 - 04.03	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 04.03.01
18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	BKY.03 - 04.04	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 04.04.01
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	BKY.03 - 05.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.01.01
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.01.02
20	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	BKY.03 - 05.02	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.02.01
			Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.02.02
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.02.03
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	BKY.03 - 05.03	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 05.02.01
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BKY.03 - 05.04	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	BKY.03 - 05.04.01
23	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	BKY.03 - 05.05	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	BKY.03 - 05.05
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	BKY.03 - 06.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	BKY.03 - 06.01.01
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.01.02
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.01.03

25	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	BKY.03 - 06.02	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	BKY.03 - 06.02.01
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	BKY.03 - 06.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	BKY.03 - 06.03.01
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	BKY.03 - 06.03.02
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	BKY.03 - 06.04	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	BKY.03 - 06.04.01
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.04.02
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	BKY.03 - 06.05	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.05.01
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.05.02
29	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	BKY.03 - 06.06	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.06.01
30	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	BKY.03 - 06.07	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	BKY.03 - 06.07.01
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	BKY.03 - 06.07.02
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	BKY.03 - 06.07.03
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	BKY.03 - 06.07.04
31	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	BKY.03 - 06.08	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	BKY.03 - 06.08.01
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.08.02
32	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BKY.03 - 06.09	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	BKY.03 - 06.09.01
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	BKY.03 - 06.09.02

			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	BKY.03 - 06.09.03
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	BKY.03 - 06.09.04
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.09.05
33	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	BKY.03 - 06.10	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.10.01
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.10.02
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	BKY.03 - 06.10.03
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.10.04
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.10.05
34	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	BKY.03 - 06.11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.11.01
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.03 - 06.11.02
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	BKY.03 - 06.12	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	BKY.03 - 06.12.01

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 3



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 3

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sekretariat Daerah

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pihak Ke-3

Masyarakat

2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan

Hidup

Sekretariat Daerah

Pihak Ke-3

Masyarakat

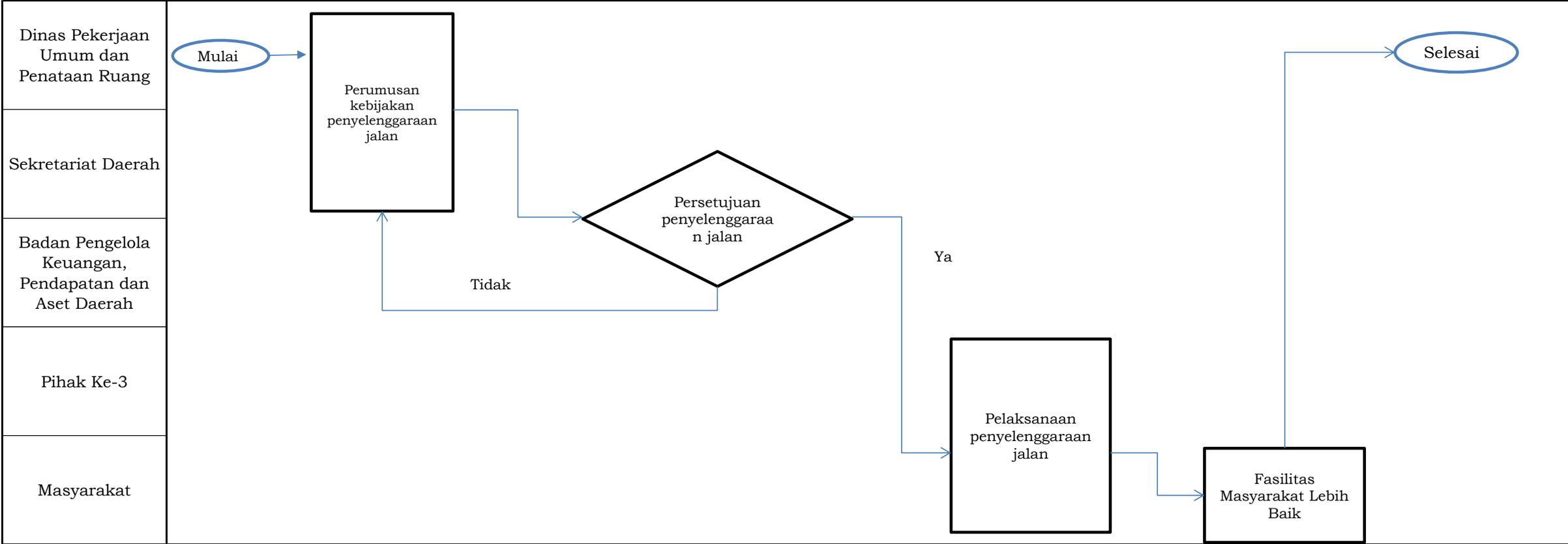
LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES



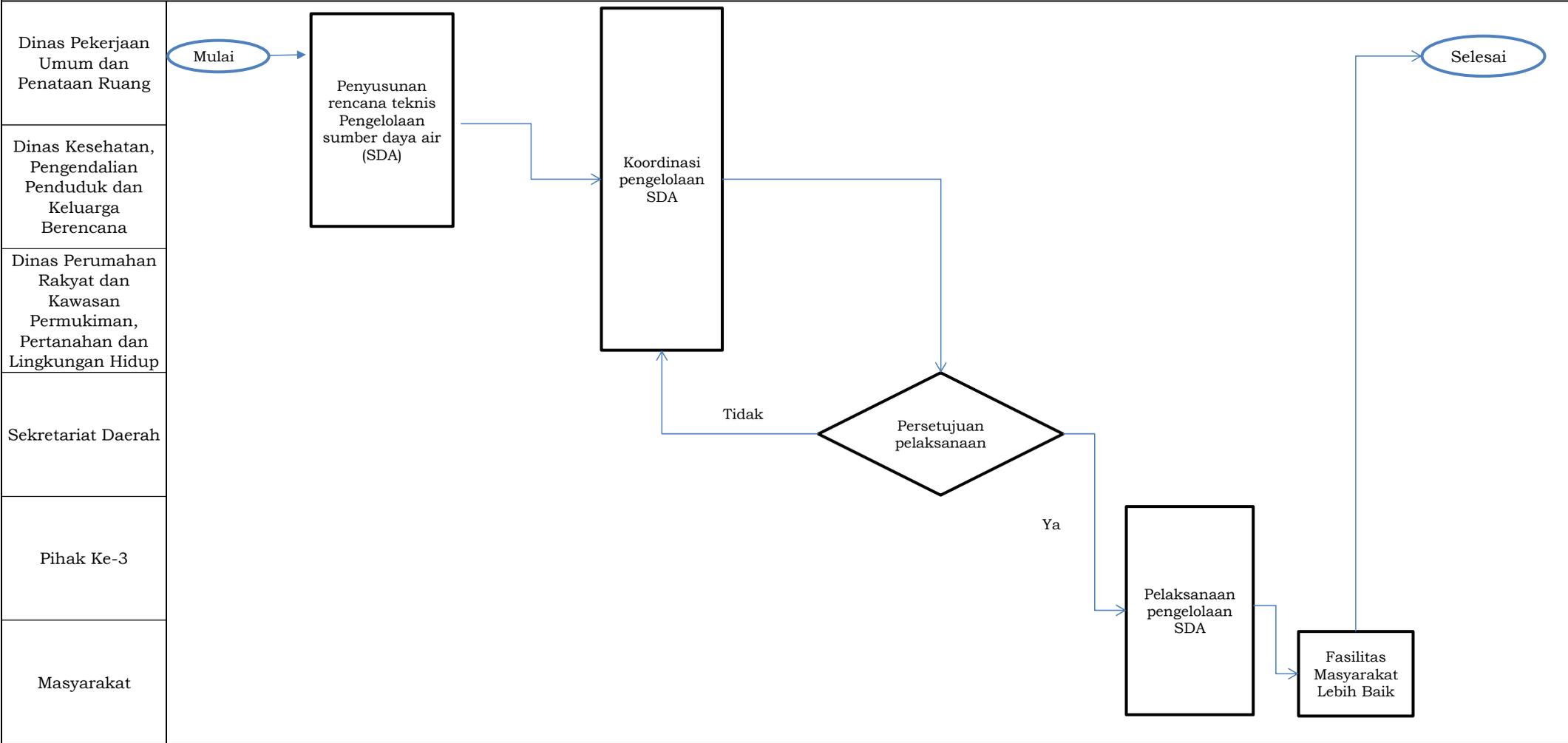
PETA LINTAS FUNGSI BKY.03 - 01

BKY.03 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN



PETA LINTAS FUNGSI BKY.03 - 01

BKY.03 - 02.01 CFM 01 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA		
MISI 4 :	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	1.1. Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura 	- Intensifikasi lahan tanam tanaman pangan dengan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			- Peningkatan kapasitas SDM petani dan penyuluh
			- Pengembangan Sistem Pasar Pertanian yang terpadu dan dengan memanfaatkan teknologi Informasi
			- Penerapan Pekarangan Pangan Lestari
			- Optimalisasi penggunaan sarana pertanian unggulan
			- Peningkatan kapasitas SDM petani
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan 	- Penumbuhan penangkar bibit tanaman hortikultura
			- Pengembangan perikanan budidaya
			- Perluasan pasar untuk menjaga stabilitas harga
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi tanaman perkebunan 	- Peningkatan kerjasama dengan industri untuk peningkatan nilai tambah
			- Peningkatan ketersediaan bibit unggul
			- Peningkatan luas tanam perkebunan rakyat
			- Fasilitasi dan pembinaan penerapan izin usaha
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi peternakan 	- Pengembangan pola budidaya perkebunan rakyat berorientasi agribisnis
			- Peningkatan kapasitas SDM petani
			- Peningkatan ketersediaan bibit unggul
- Penyediaan pakan ternak terjangkau			
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan 	- Pengembangan pola budidaya		
	- Peningkatan kapasitas peternak		
	- Peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia usaha		
	- Penyediaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)		
	- Penyediaan bibit unggul		
			- Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan magang
			- Peningkatan akses permodalan

		• Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	- Menyederhanakan mata rantai komoditi hasil pertanian dan perikanan
			- Perluasan pasar pertanian dan perikanan untuk menjaga stabilitas harga
			- Peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan
	1.2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	• Peningkatan kunjungan wisatawan	- Pengembangan destinasi wisata
			- Optimalisasi kerjasama pengembangan destinasi wisata
		• Identifikasi potensi investasi di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata	- Optimalisasi metode dan sistem perhitungan PMA dan PMDN
		• Peningkatan kondusifitas iklim investasi di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata	- Percepatan pengesahan peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi
		• Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata	- Penyediaan Mall Pelayanan Publik
			- Peningkatan cakupan pelayanan permodalan
			- Kerjasama promosi investasi

LEMBAR KERJA 2

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	1.1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	1.2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	1.3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	1.4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	1.5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
	1.6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	1.7. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
	1.8. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	1.9. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	2.1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	2.3. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	2.4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	2.5. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	
	2.6. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.7. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	2.8. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	2.9. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 4	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
TUJUAN	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
SASARAN	1. Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
	2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	UTAMA	BKY.04 - 01
2	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	UTAMA	BKY.04 - 02
3	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.04 - 03
4	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.04 - 04
5	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.04 - 05
6	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.04 - 06

LEMBAR KERJA 6

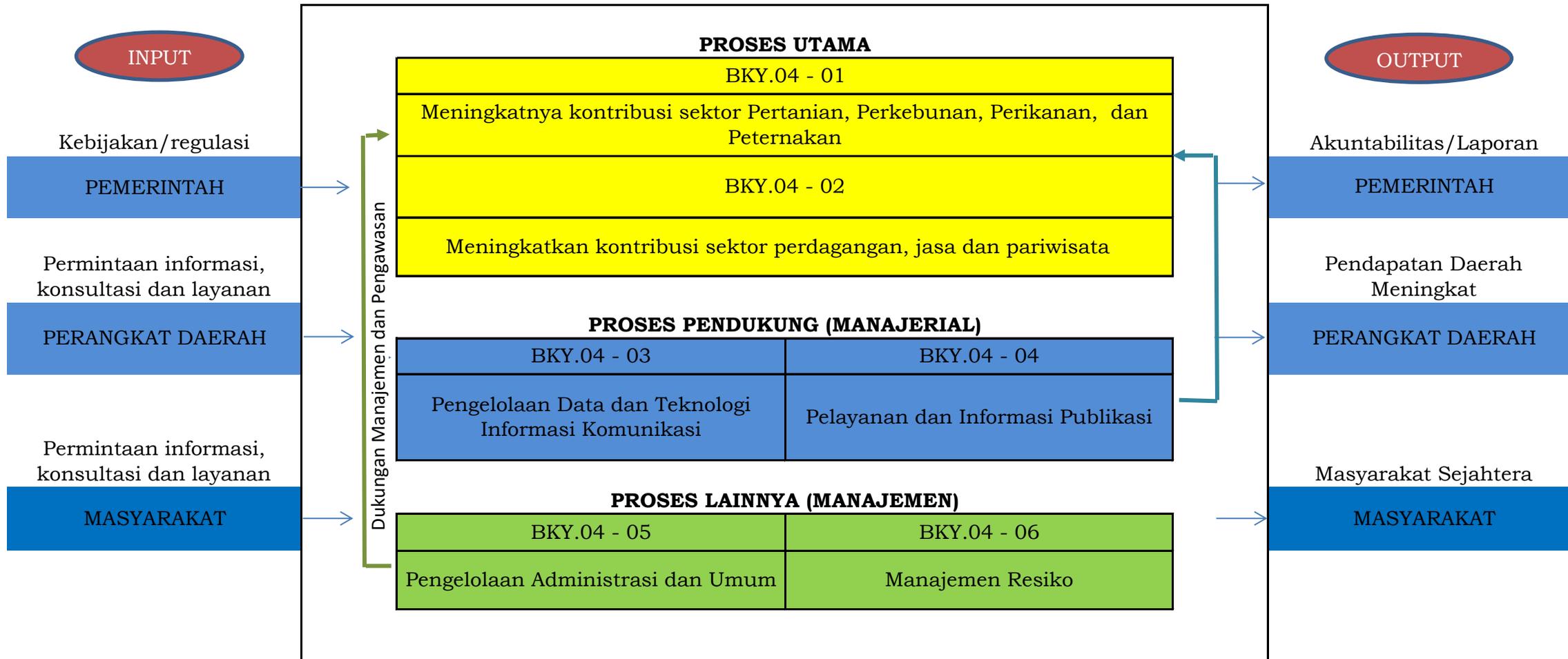
IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BKY.04 - 01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	BKY.04 - 01.01.01
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.01.02
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.01.03
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	BKY.04 - 01.01.04
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.01.05
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	BKY.04 - 01.01.06
			2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	BKY.04 - 01.02.02			
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah	BKY.04 - 01.02.03			
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	BKY.04 - 01.02.04			
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	BKY.04 - 01.03	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.03
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.03.01
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	BKY.04 - 01.03.02
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	BKY.04 - 01.03.03
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	BKY.04 - 01.03.04

4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	BKY.04 - 01.04	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.04.01
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	BKY.04 - 01.05	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.05.01
			Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	BKY.04 - 01.05.02
			Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	BKY.04 - 01.05.03
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	BKY.04 - 01.06	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	BKY.04 - 01.06.01
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	BKY.04 - 01.07	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	BKY.04 - 01.07.01
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.07.02
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	BKY.04 - 01.07.03
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.07.04
			Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	BKY.04 - 01.07.05
			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.07.06

8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BKY.04 - 01.08	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.08.01
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	BKY.04 - 01.08.02
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 01.08.03
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	BKY.04 - 01.09	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	BKY.04 - 01.09.01
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	BKY.04 - 01.09.02
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	BKY.04 - 01.09.03
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	BKY.04 - 02.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	BKY.04 - 02.01.01
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	BKY.04 - 02.01.02
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	BKY.04 - 02.02	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	BKY.04 - 02.02.01
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.02.02
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.02.03
12	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	BKY.04 - 02.03	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	BKY.04 - 02.03.01
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	BKY.04 - 02.04	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.04.01
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	BKY.04 - 02.05	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.05.01
15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	BKY.04 - 02.06	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.06.01
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.06.02
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.06.03

			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.06.04
16	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	BKY.04 - 02.07	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.07.01
17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	BKY.04 - 02.08	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.04 - 02.08.01
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	BKY.04 - 02.08.02
18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	BKY.04 - 02.09	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	BKY.04 - 02.09.01
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	BKY.04 - 02.09.02

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 4



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 4

1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kelompok Tani
Desa
Sekretariat Daerah
Pihak Ke-3

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Pelaku Usaha
Masyarakat

LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES

INPUT

Perumusan Kebijakan/regulasi

BKY.04 - 01

Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, dan Peternakan

BKY.04 - 01.01

**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN**

BKY.04 - 02

Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan
pariwisata

BKY.04 - 02.01

▪ **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN**

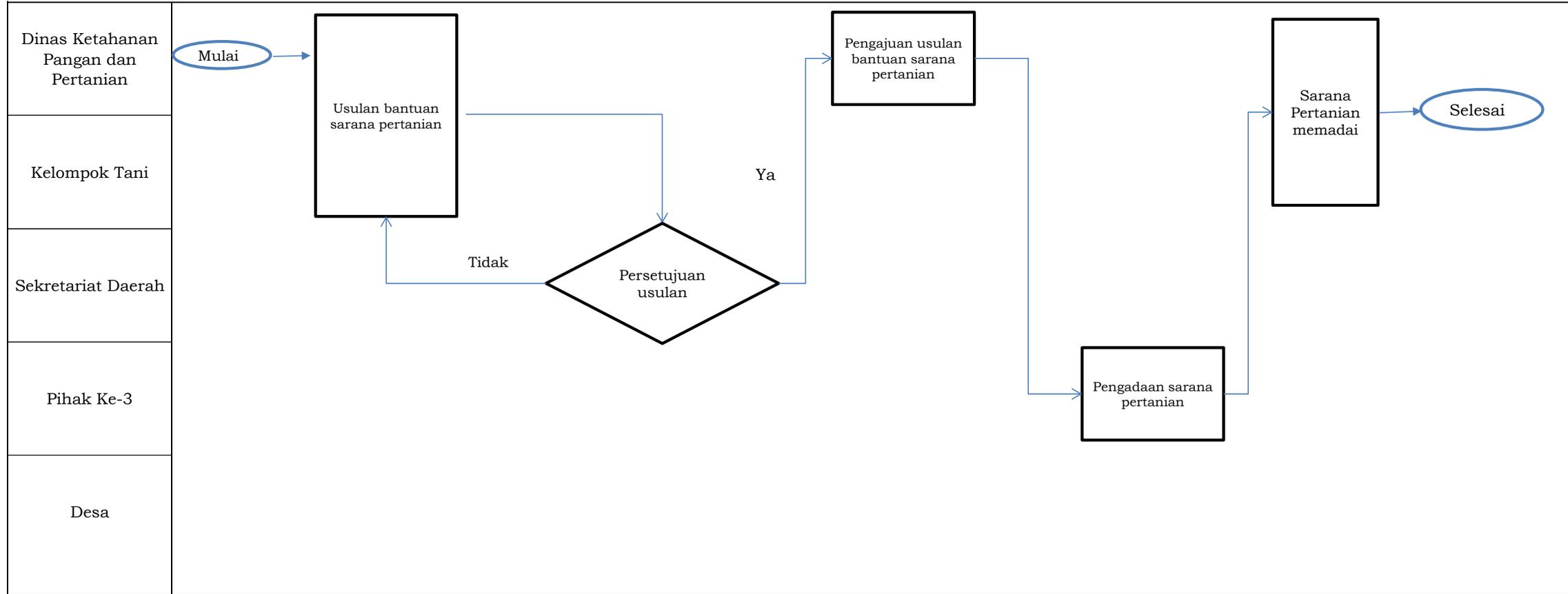
OUTPUT

Sarana Pertanian memadai

Sarana Distribusi perdagangan
meningkat

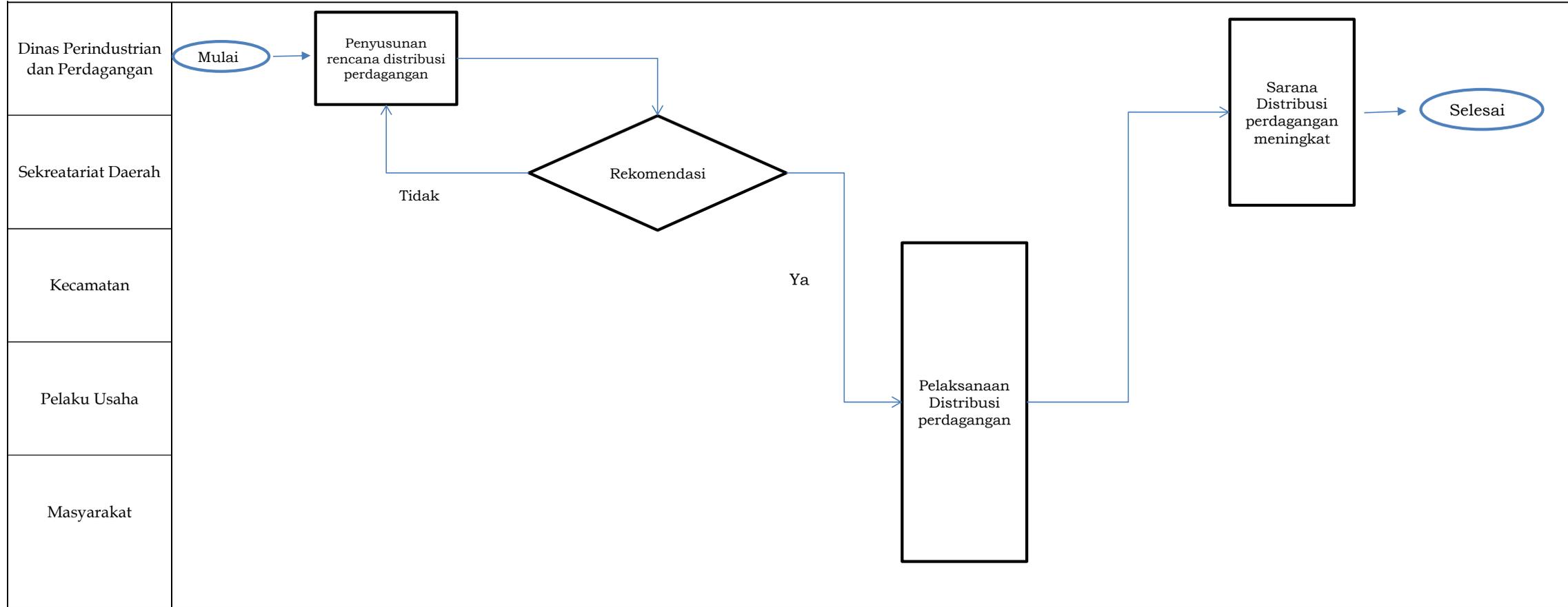
PETA LINTAS FUNGSI BKY.04 - 01

BKY.04 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN



PETA LINTAS FUNGSI BKY.04 - 01

BKY.04 - 02.01 CFM 01 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA		
MISI 5 :	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa.	1.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa 	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur desa
			- Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa
			- Menyediakan aplikasi yang dapat menunjukkan perkembangan desa- desa di Kabupaten Bengkayang
	1.2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD 	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD melalui pendidikan, pelatihan, dan magang di desa lain yang lebih maju
			- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap digital management dan digital ekonomi desa
			- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD melalui penerapan non cash, yaitu Cash Management System (CMS)
2. Meningkatkan kemandirian dan	2.1 Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah desa mandiri • Penurunan kemiskinan desa 	- Meningkatkan kualitas indikator- indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM)
			- Meningkatkan frekuensi pelatihan usaha dan kerajinan rumah tangga bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di desa
		- Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes	
		- Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional	
		- Menyediakan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di desa	
		- Menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin desa	
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa 	- Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN di desa
			- Meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian energi desa
- Menyediakan internet hingga ke desa			
			- Menyediakan akses internet gratis di kantor desa dan fasilitas publik lainnya

LEMBAR KERJA 2

MISI 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Menjadi Smart Desa		
SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	1.1. PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	2.1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
3. Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	17 KECAMATAN
	3.2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	3.3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

LEMBAR

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 5	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa.2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa
SASARAN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD3. Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD
	Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

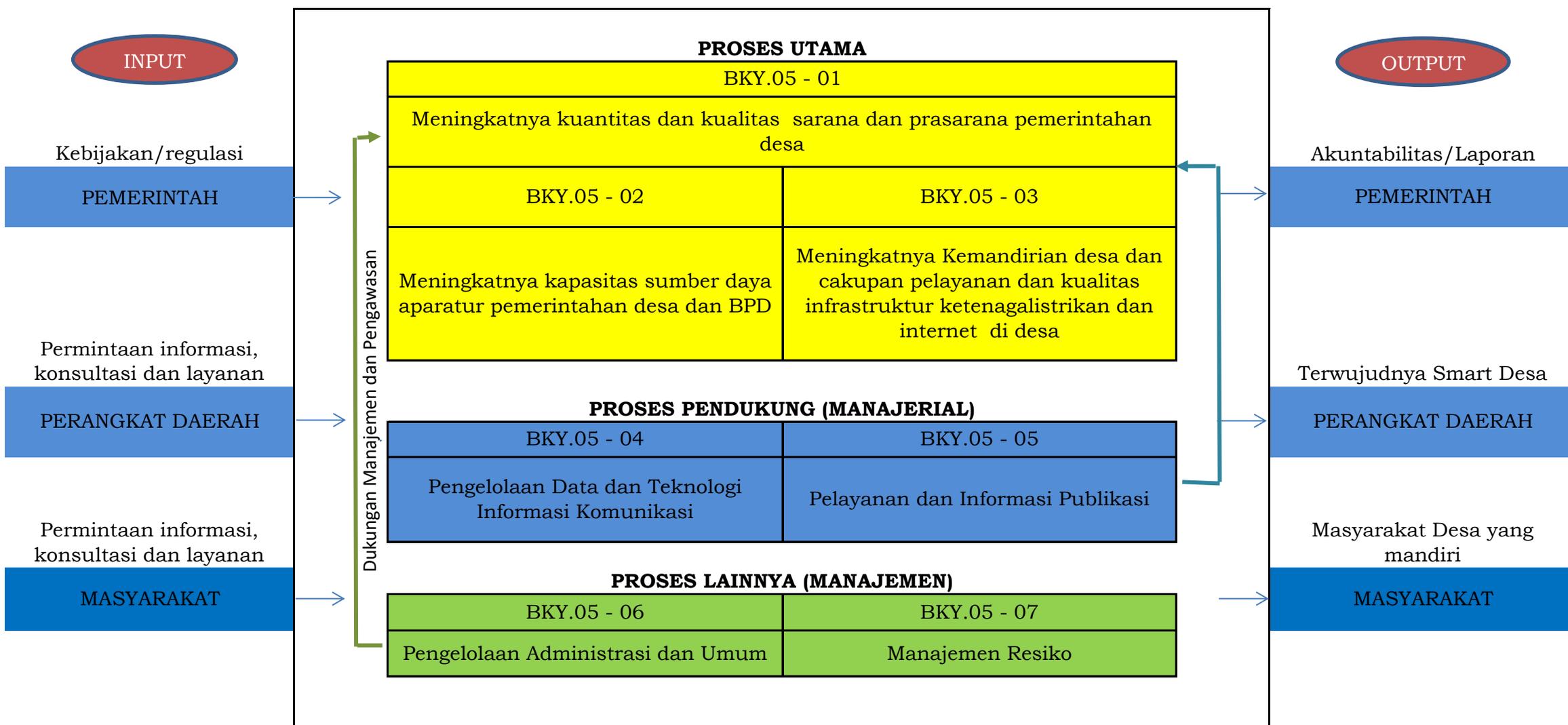
TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	UTAMA	BKY.05 - 01
2	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	UTAMA	BKY.05 - 02
3	Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	UTAMA	BKY.05 - 03
4	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.05 - 04
5	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.05 - 05
6	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.05 - 06
7	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.05 - 07

LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENATAAN DESA	BKY.05 - 01.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	BKY.05 - 01.01.01
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	BKY.05 - 01.02	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	BKY.05 - 01.02.01
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	BKY.05 - 02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BKY.05 - 02.01.01
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	BKY.05 - 03.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.05 - 03.01.01
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	BKY.05 - 03.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	BKY.05 - 03.02.01
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BKY.05 - 03.02.02
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BKY.05 - 03.02.03
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	BKY.05 - 03.03	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	BKY.05 - 03.03.01

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 5



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 5

1 PROGRAM PENATAAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Desa
Masyarakat

2 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

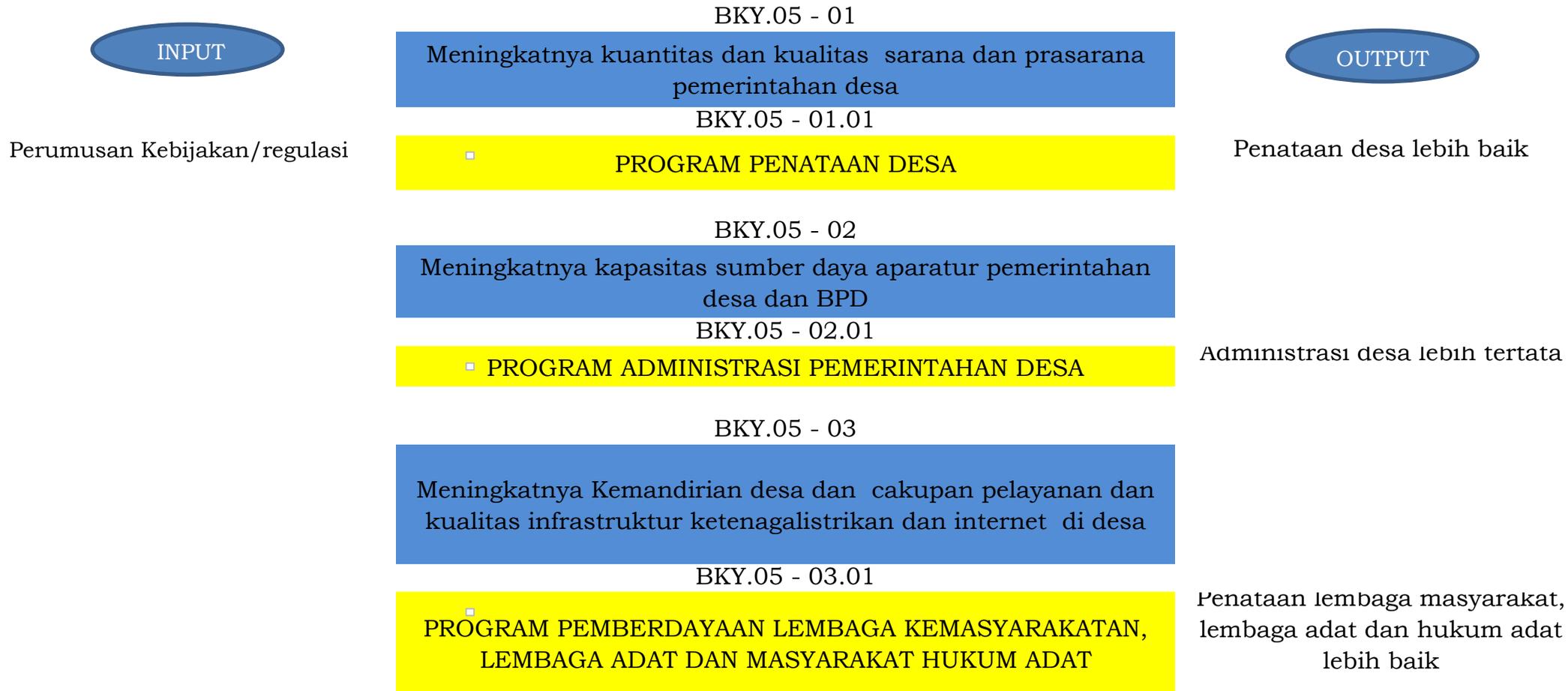
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Desa
Masyarakat

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Desa
Masyarakat

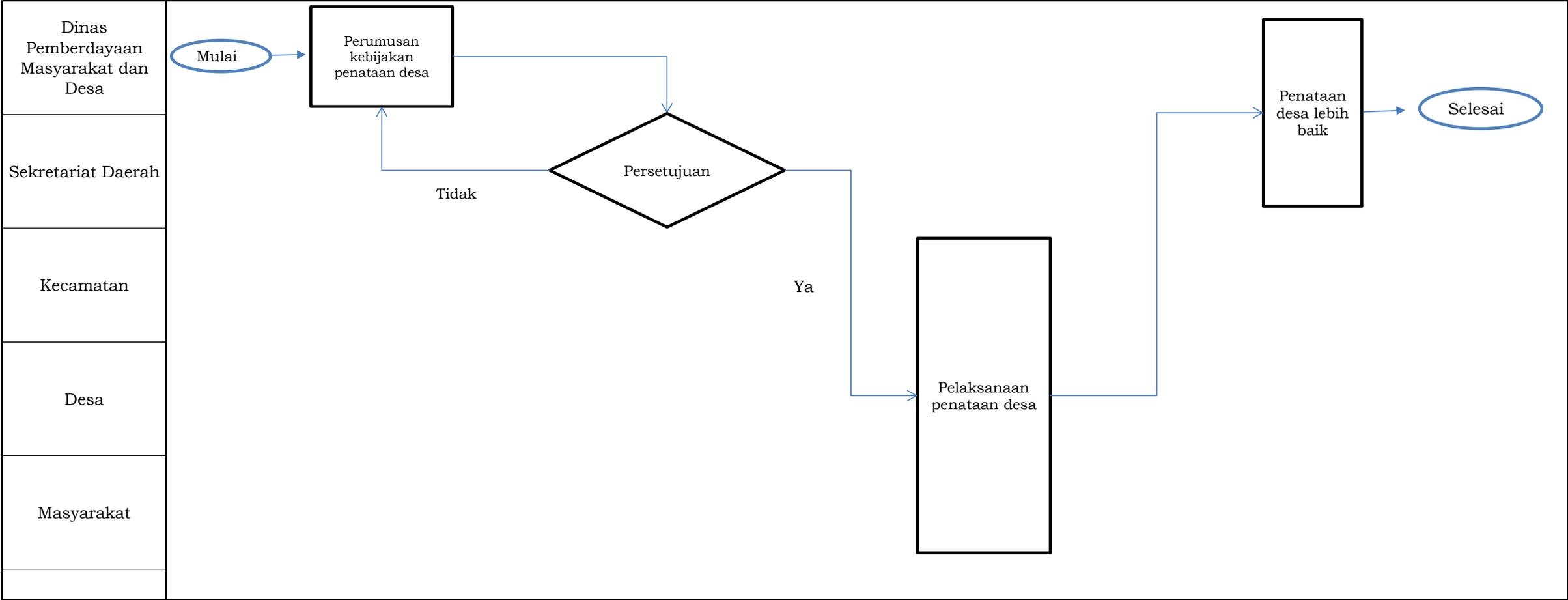
LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES



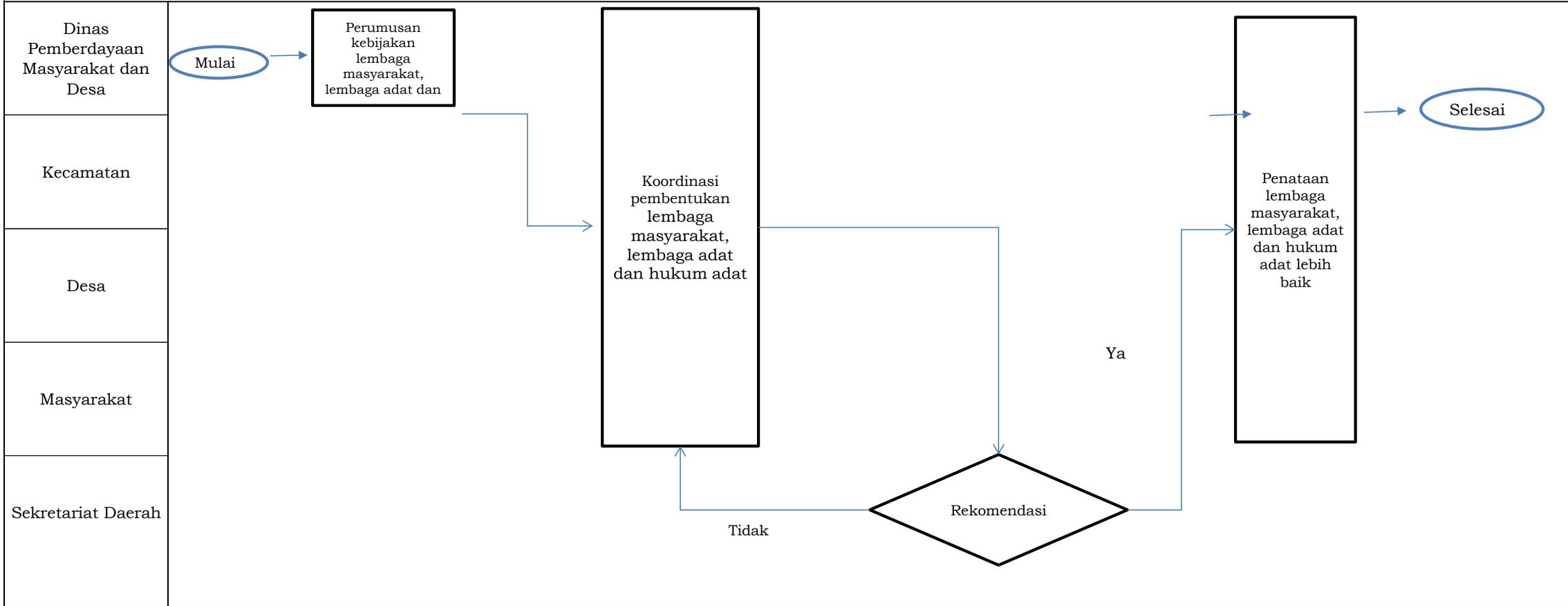
PETA LINTAS FUNGSI BKY.05 - 01

BKY.05 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENATAAN DESA



PETA LINTAS FUNGSI BKY.05 - 01

BKY.05 - 03.01 CFM 01 : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA		
MISI 6 :	Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Optimal		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	1.1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	• Peningkatan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	- Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan
		• Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	- Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan
			- Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes
	1.2. Meningkatnya volume perdagangan kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	• Peningkatan volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	- Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa
			- Peningkatan kualitas SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDes
			- Pemanfaatan teknologi tepat guna termasuk teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan potensi desa
			- Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash
			- Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia
			- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual (digital)

LEMBAR KERJA 2**MISI 6 : Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Optimal**

SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	1.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2. Meningkatnya volume perdagangan kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	2.1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 6	Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Optimal
TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan
SASARAN	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan
	2. Meningkatnya volume perdagangan kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan
	Meningkatnya volume perdagangan kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

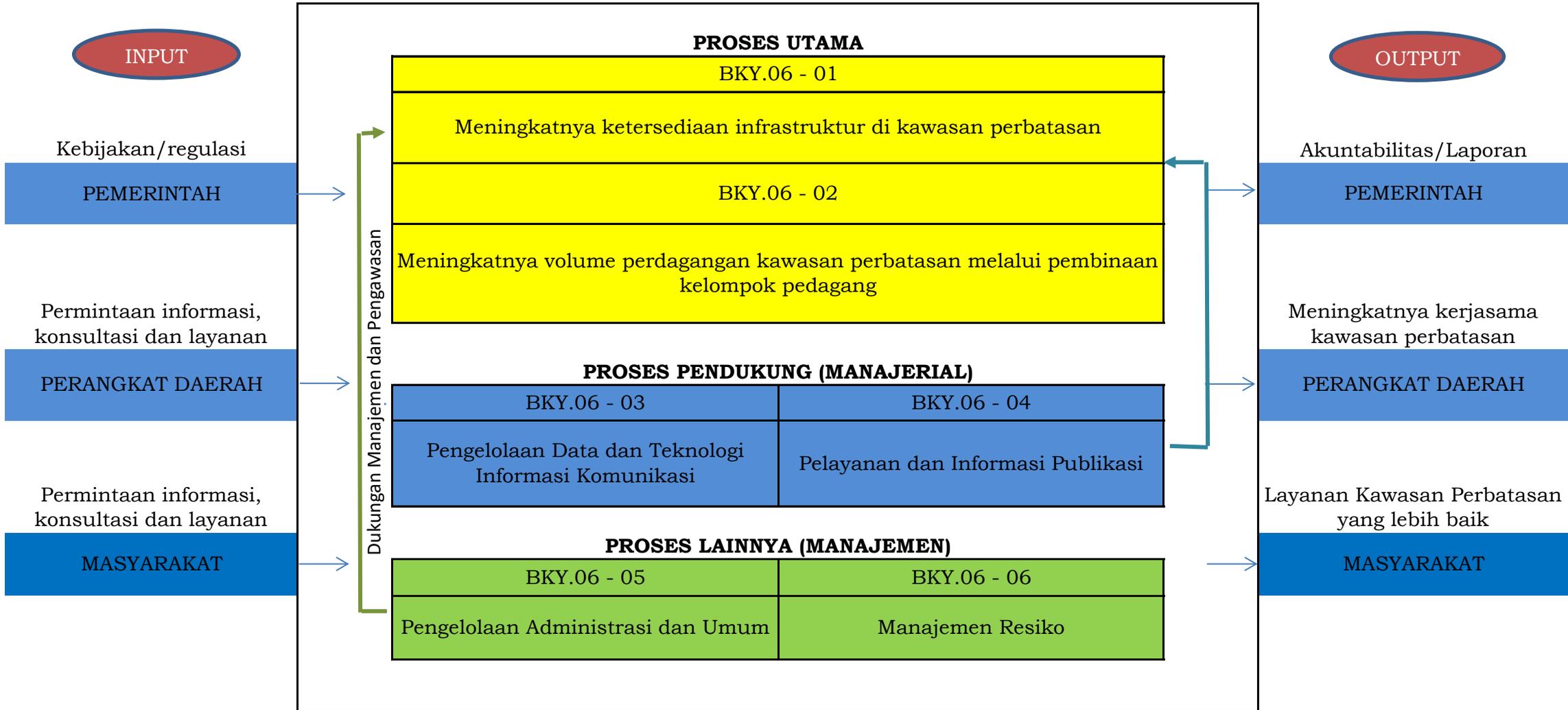
NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	UTAMA	BKY.06 - 01
2	Meningkatnya volume perdagangan kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	UTAMA	BKY.06 - 02
3	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.06 - 03
4	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.06 - 04
5	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.06 - 05
6	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.06 - 06

LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BKY.06 - 01.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	BKY.06 - 01.01.01
			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	BKY.06 - 01.01.02
			Monitoring dan Evaluasi	BKY.06 - 01.01.03
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	BKY.06 - 02.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.06 - 02.01.01

LEMBAR KERJA 7

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 6



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 6

1 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kecamatan

Desa

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

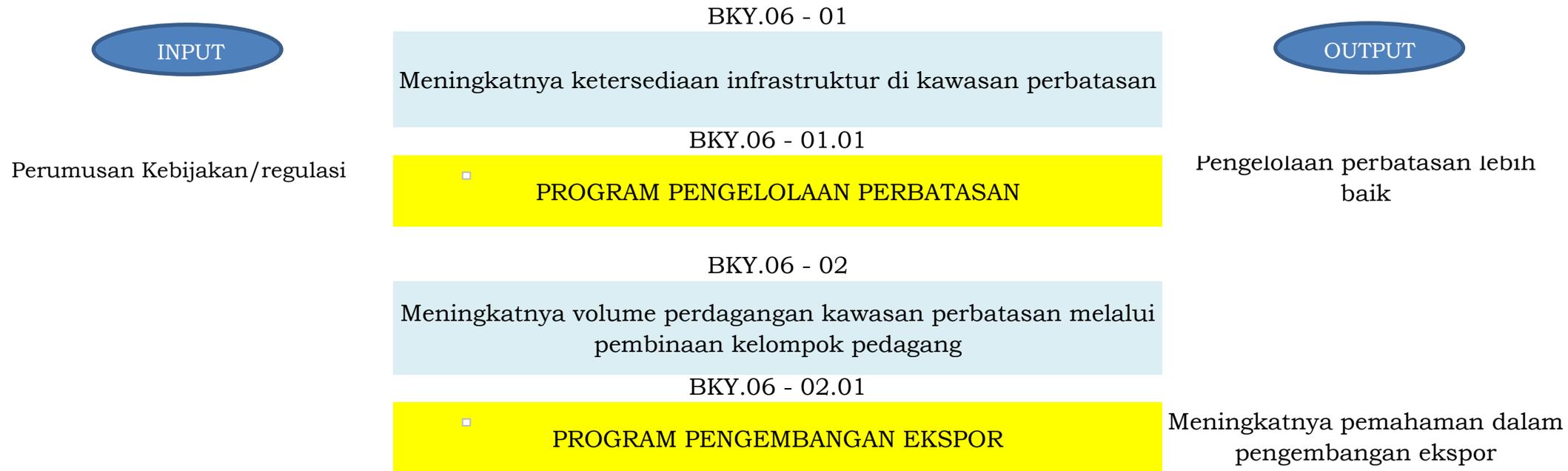
Kecamatan

Desa

Sekretariat Daerah

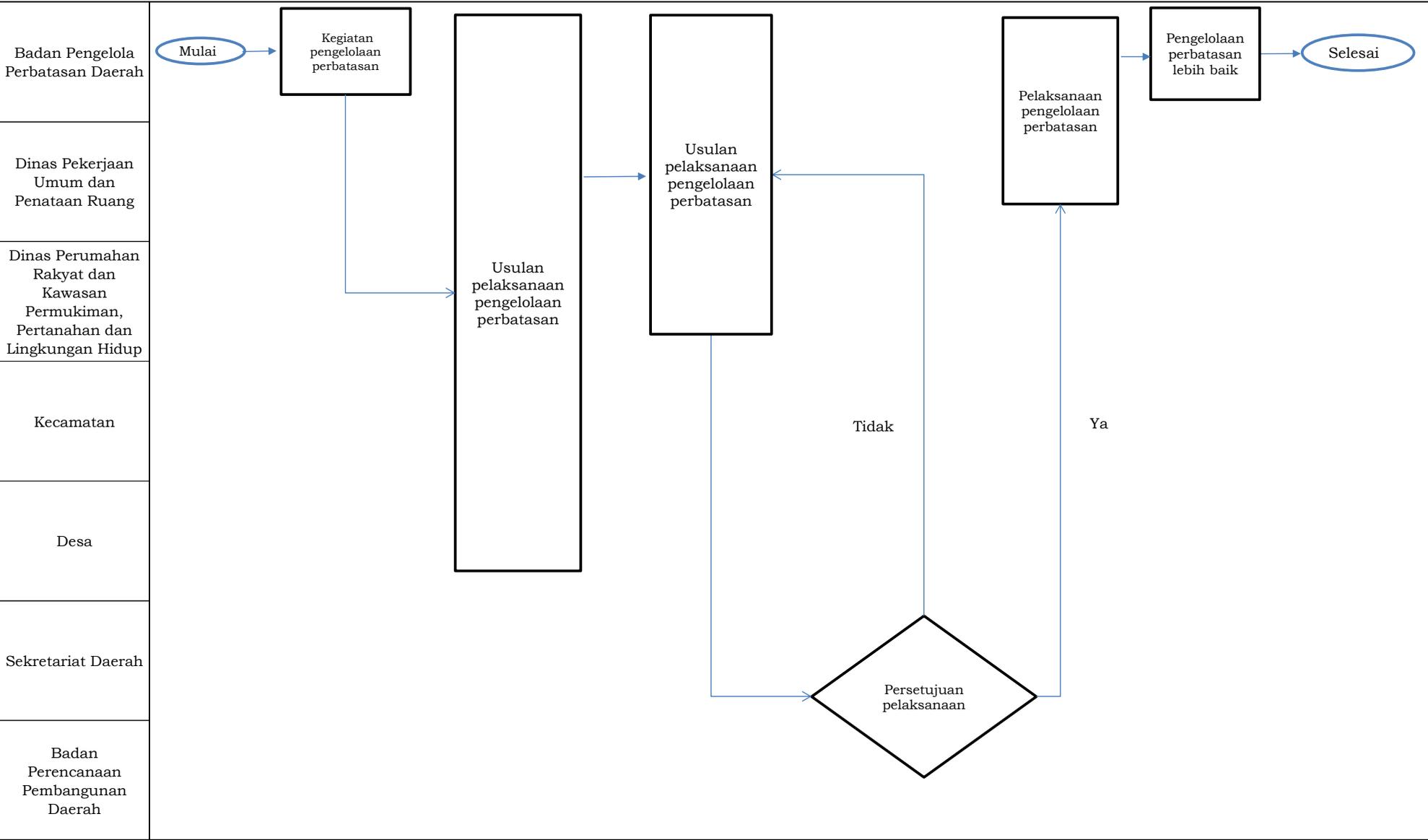
LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES



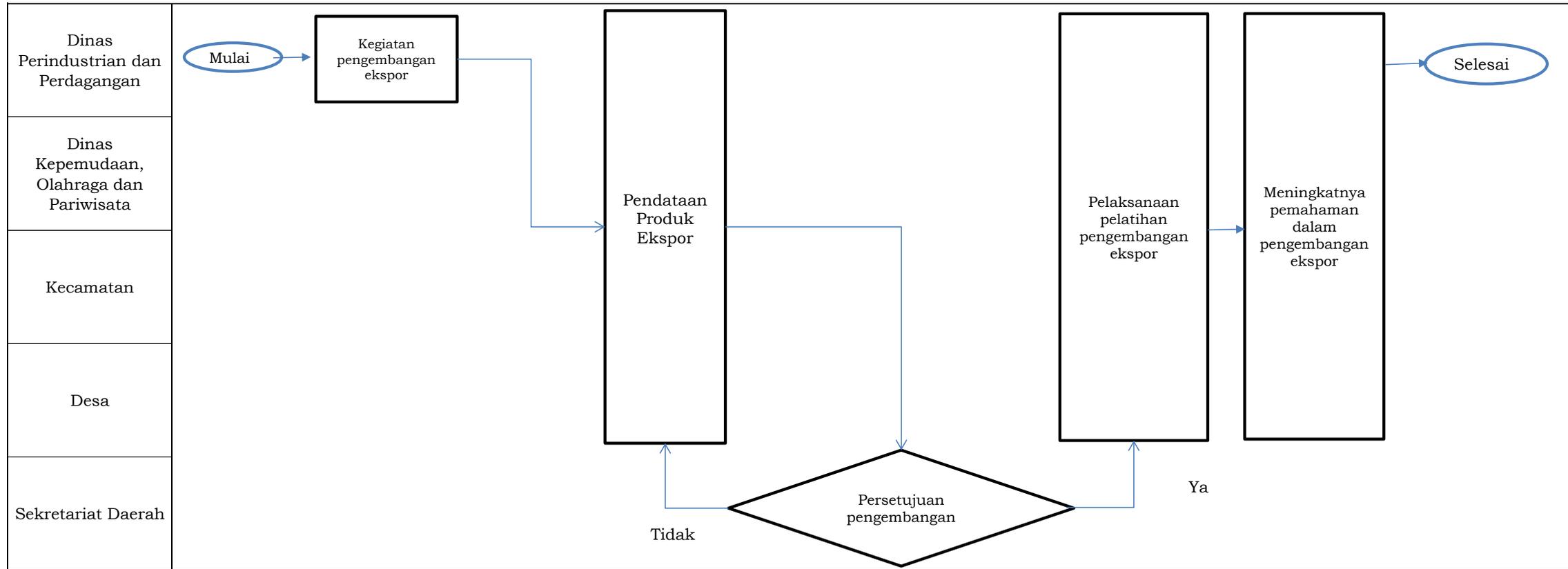
PETA LINTAS FUNGSI BKY.06 - 01

BKY.06 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN



PETA LINTAS FUNGSI BKY.06 - 02

BKY.06 - 02.01 CFM 01 : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR



LEMBAR KERJA 1

VISI :	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA			
MISI 7 :	Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam	
			- Penegakan hukum lingkungan secara adil dan konsisten	
			- Memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien	
			- Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan tampungnya, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam	
	1.2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	• Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan		- Peningkatan kapasitas sistem pengolahan persampahan
				- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
1.3. Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	• Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana		- Penyediaan TPA berbasis Control Landfill serta penambahan area pelayanan persampahan	
			- Penyediaan TPA berbasis Control Landfill serta penambahan area pelayanan persampahan	
			- Melaksanakan RTRW secara konsisten	
			- Mengendalikan pemanfaatan ruang	
			- Meningkatkan layanan informasi di kawasan rawan bencana	
			- Meningkatkan kesiapsiagaan Desa di kawasan rawan bencana	

LEMBAR KERJA 2

MISI 7 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan		
SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	1.3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	1.4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	1.5. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	1.6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.7. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	2.1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	2.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	2.4. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.5. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
	2.6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
3. Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	3.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3.2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA
MISI 7	Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan
TUJUAN	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana
SASARAN	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW
	3. Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana

LEMBAR KERJA 4

PROSES UTAMA	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW
	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana
PROSES PENDUKUNG	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pelayanan dan Informasi Publikasi
PROSES LAINNYA	Pengelolaan Administrasi dan Umum
	Manajemen Resiko

LEMBAR KERJA 5

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	UTAMA	BKY.07 - 01
2	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	UTAMA	BKY.07 - 02
3	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	UTAMA	BKY.07 - 03
4	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	BKY.07 - 04
5	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	BKY.07 - 05
6	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	BKY.07 - 06
7	Manajemen Resiko	LAINNYA	BKY.07 - 07

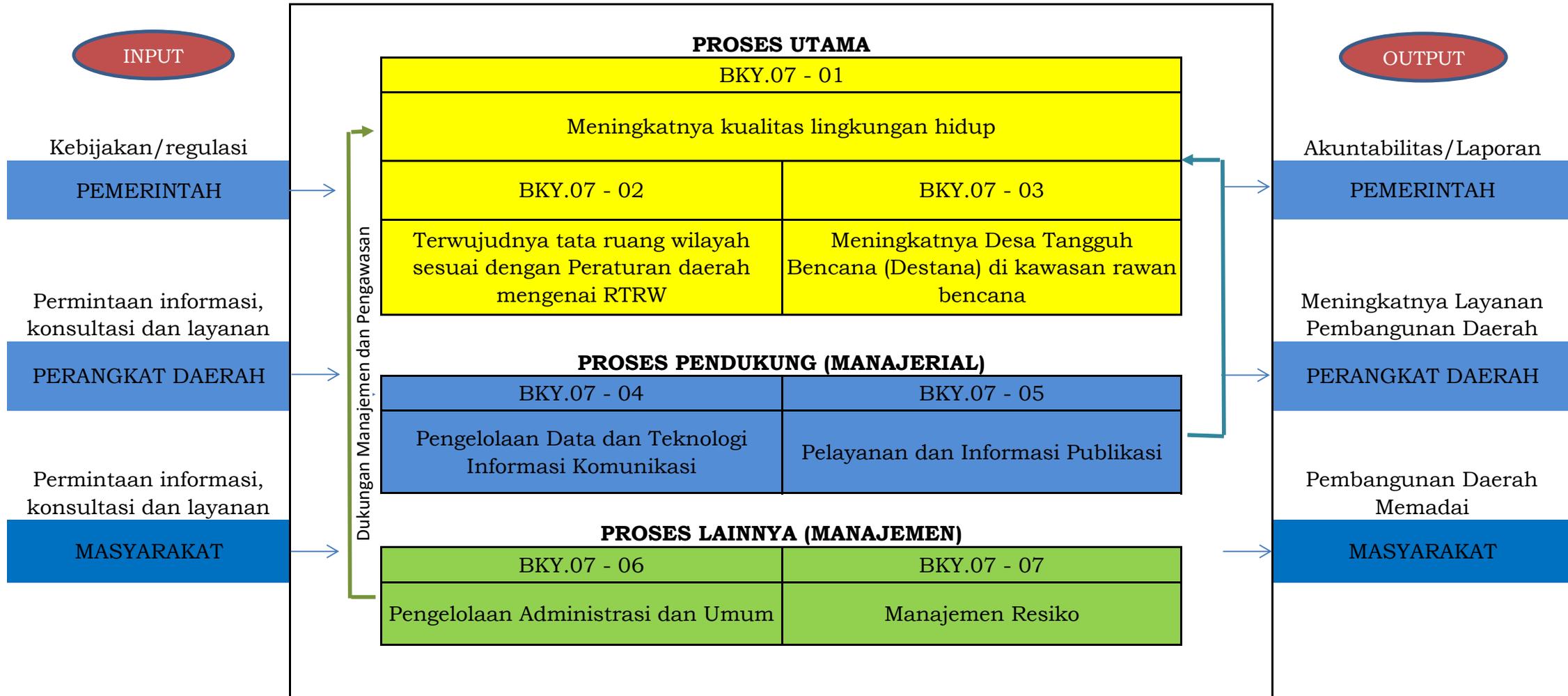
LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP				
NO	NAMA SUB PROSES (Program)	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI (Kegiatan)	KODE LINTAS FUNGSI
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BKY.07 - 01.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.01.01
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.01.02
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.01.03
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	BKY.07 - 01.02	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.02.01
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	BKY.07 - 01.03	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.03.01
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	BKY.07 - 01.04	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.04.01
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	BKY.07 - 01.05	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.05.01
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	BKY.07 - 01.06	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	BKY.07 - 01.06.01
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	BKY.07 - 01.07	Pengelolaan Sampah	BKY.07 - 01.07.01
			Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	BKY.07 - 01.07.02
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	BKY.07 - 01.07.03

8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	BKY.07 - 02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	BKY.07 - 02.01.01
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BKY.07 - 02.02	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.02.01
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	BKY.07 - 02.03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.03.01
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.03.02
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.03.03
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.03.04
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	BKY.07 - 02.04	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.04.01
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	BKY.07 - 02.05	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.05.01
			Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.05.02
13	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	BKY.07 - 02.06	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 02.06.01
14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BKY.07 - 03.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BKY.07 - 03.01.01
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BKY.07 - 03.01.02
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BKY.07 - 03.01.03
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BKY.07 - 03.01.04
15	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BKY.07 - 03.02	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BKY.07 - 03.01.01
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	BKY.07 - 03.01.02
			Investigasi Kejadian Kebakaran	BKY.07 - 03.01.03
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	BKY.07 - 03.01.04
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	BKY.07 - 03.01.05

LEMBAR KERJA 7

IDENTIFIKASI PETA KABUPATEN BENGKAYANG MISI 7



LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI KABUPATEN BENGKAYANG MISI 7

1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kecamatan
Desa
Sekretariat Daerah

2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretariat Daerah
Semua Perangkat Daerah
Masyarakat
TNI/POLRI
Damkar Swasta

3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretariat Daerah
Semua Perangkat Daerah
Masyarakat
TNI/POLRI
Damkar Swasta

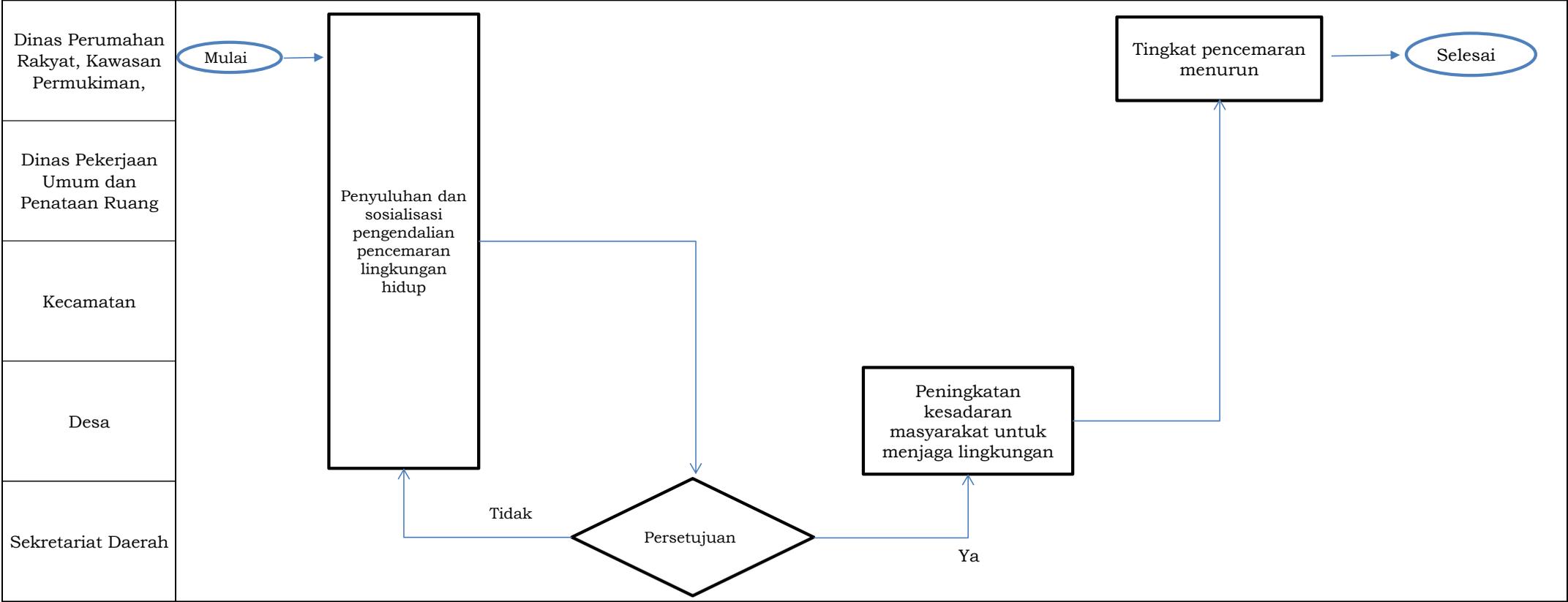
LEMBAR KERJA 9

PETA SUB PROSES



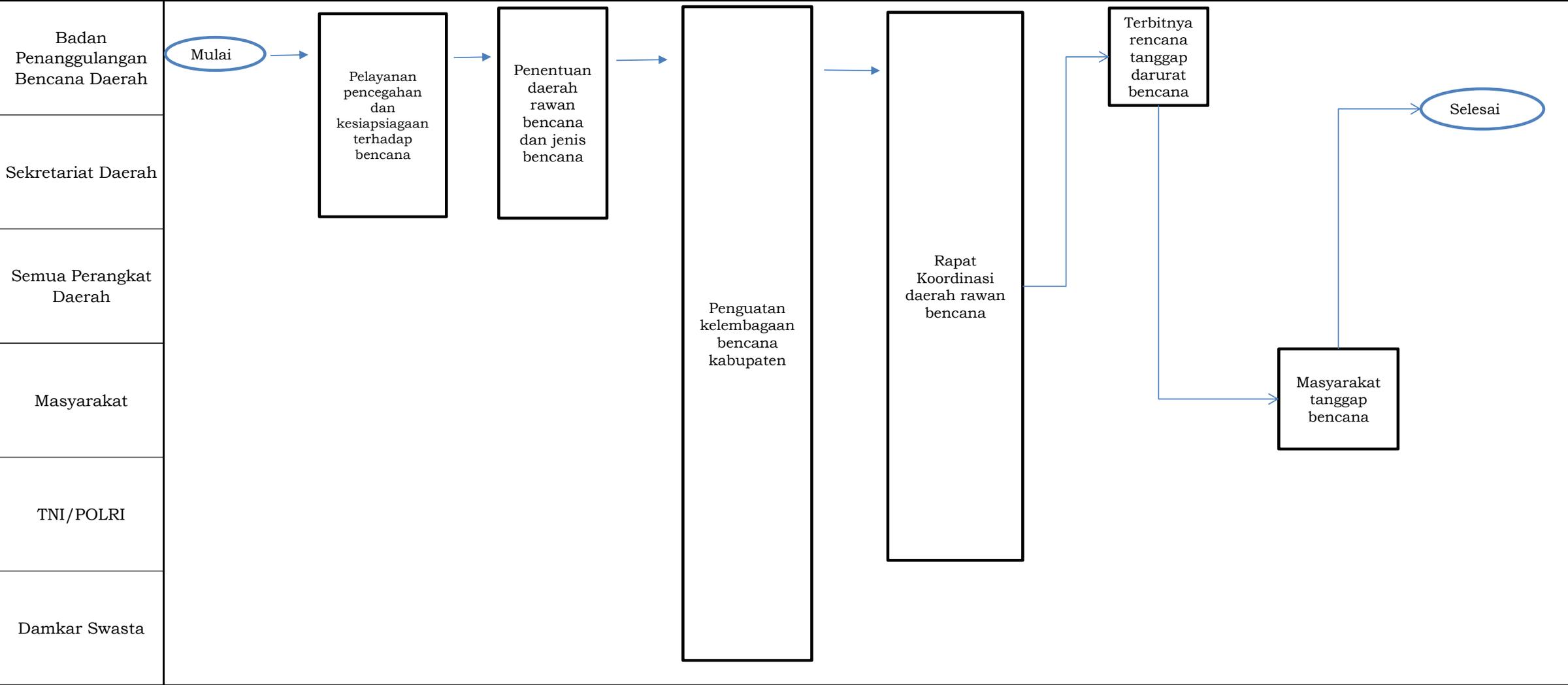
PETA LINTAS FUNGSI BKY.07 - 01

BKY.07 - 01.01 CFM 01 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



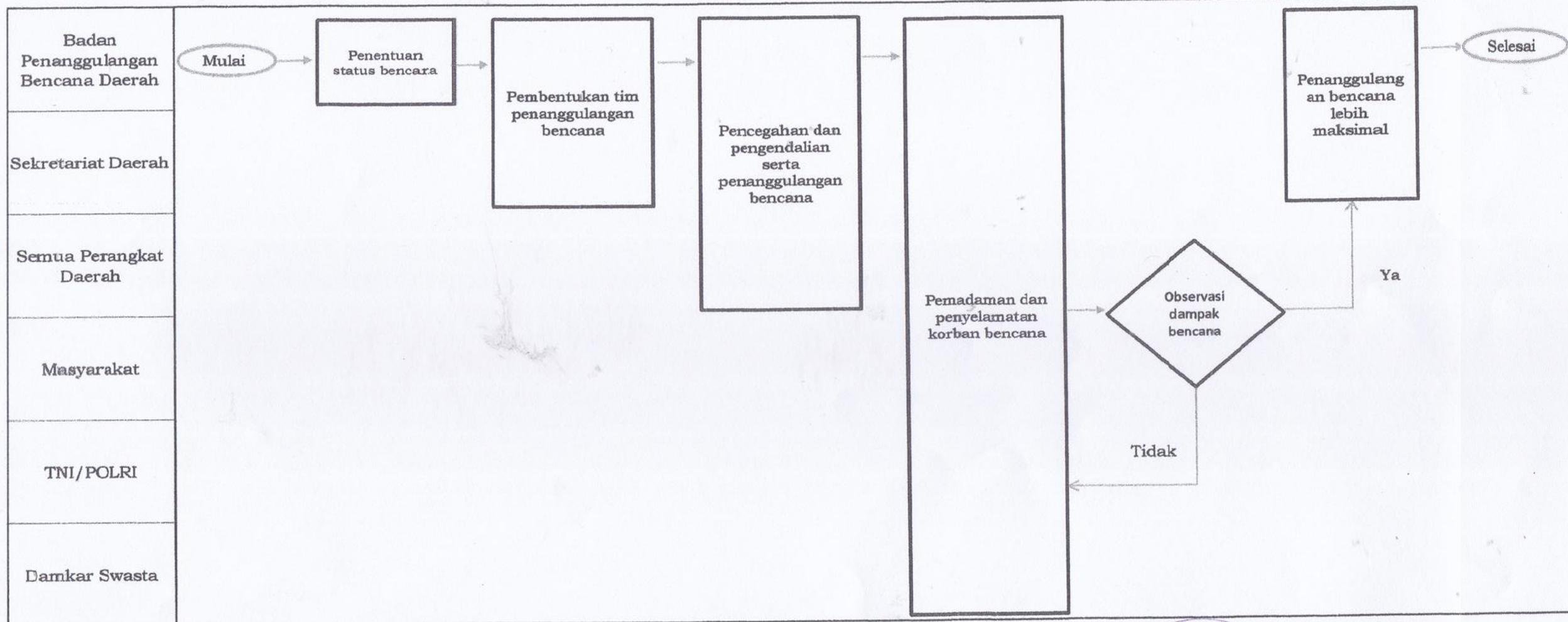
PETA LINTAS FUNGSI BKY.07 - 01

BKY.07 - 03.01 CFM 01 : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



PETA LINTAS FUNGSI BKY.07 - 01

BKY.07 - 03.02 CFM 01 : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN



BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS